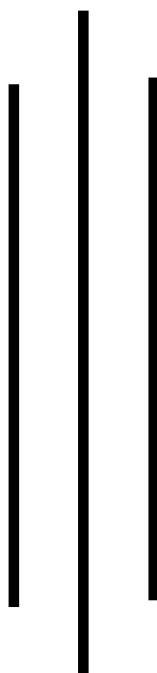




# **LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2019**



## **PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jenderal A. Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122

Tlp. 0741-63197 Fax. 63197

Website : [www.disdik.jambiprov.go.id](http://www.disdik.jambiprov.go.id) | email : [mail@disdik.jambiprov.go.id](mailto:mail@disdik.jambiprov.go.id)

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Jambi,        Juni 2019**  
**Pengguna Anggaran**

**H. Agus Herianto, SH**  
**NIP 196908181997031004**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1                      Urusan Wajib Pelayanan Dasar  
Bidang Pemerintahan : 1 . 01              Pendidikan  
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01              Dinas Pendidikan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN - LRA	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22	6.579.493.820,00
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22	10.800.000,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22	10.800.000,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	0,00	0,00	0,00	6.568.693.820,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	6.568.693.820,00
5	BELANJA	1.030.562.205.653,13	985.496.046.839,14	95,63	832.786.437.627,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	915.815.454.650,13	887.762.411.684,14	96,94	761.012.808.660,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	606.850.106.653,13	582.670.970.194,14	96,02	503.306.517.731,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	308.965.347.997,00	305.091.441.490,00	98,75	256.938.666.847,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	767.624.082,00
5 . 2	BELANJA MODAL	114.746.751.003,00	97.733.635.155,00	85,17	71.773.628.967,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.185.160.896,00	26.665.499.259,00	71,71	22.399.357.316,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.431.770.107,00	55.249.312.885,00	88,50	35.794.949.400,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.000.000,00	69.733.000,00	99,62	0,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.059.820.000,00	15.749.090.011,00	104,58	13.579.322.251,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.030.549.605.653,13)	(985.480.646.839,14)	95,63	(826.206.943.807,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.030.549.605.653,13)	(985.480.646.839,14)	95,63	(826.206.943.807,00)

Jambi,      Juni 2019  
Pengguna Anggaran

H. Agus Herianto, SH  
NIP. 19690818 199703 1 004



# NERACA

## PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan

URAIAN	2018	2017
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	4.468.963.908,00	22.208.901.711,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.837.600,00	2.196.000,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>4.471.801.508,00</b>	<b>22.211.097.711,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
penyisihan piutang dana bergulir dari investasi non permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH penyisihan piutang dana bergulir dari investasi non permanen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	192.331.943.039,92	83.695.941.666,06
Gedung dan Bangunan	667.864.554.772,19	174.087.877.990,32
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.305.931.347,21	5.847.906.600,00
Aset Tetap Lainnya	159.002.320.401,03	129.755.312.709,46
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.018.028.932,00	1.039.291.000,00
Akumulasi Penyusutan	(299.522.075.385,73)	(116.005.482.655,31)

Urusan Pemerintahan : 1 . 01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan

URAIAN	2018	2017
JUMLAH ASET TETAP	730.000.703.106,62	278.420.847.310,53
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
Aset Lain-lain	124.456.025.953,00	124.456.025.953,00
Akumulasi Amortisasi	(2.400.000.000,00)	(2.400.000.000,00)
akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	124.456.025.953,00	124.456.025.953,00
JUMLAH ASET	858.928.530.567,62	425.087.970.974,53
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	62.610.000,00	6.206.780.000,00
Utang Kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa Kantor	59.772.525,00	62.138.765,00
Kewajiban Penerimaan Dana Reklamasi	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	122.382.525,00	6.268.918.765,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	122.382.525,00	6.268.918.765,00
EKUITAS		
EKUITAS	858.806.148.042,62	418.819.052.209,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	858.928.530.567,62	425.087.970.974,53



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		Pendidikan			
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		Dinas Pendidikan			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	15.400.000,00	273.051.350,00	(257.651.350,00)	(94,36)
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	15.400.000,00	10.800.000,00	4.600.000,00	42,59
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	15.400.000,00	10.800.000,00	4.600.000,00	42,59
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	262.251.350,00	(262.251.350,00)	(100,00)
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	262.251.350,00	(262.251.350,00)	(100,00)
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	890.157.625.403,37	772.296.262.361,73	117.861.363.041,64	15,26
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	582.688.970.194,14	503.306.517.731,00	79.382.452.463,14	15,77
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	305.070.433.650,00	257.001.535.137,00	48.068.898.513,00	18,70
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	767.624.082,00	(767.624.082,00)	(100,00)
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.398.221.559,23	11.220.585.411,73	(8.822.363.852,50)	(78,63)
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 10	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)	(118.119.014.391,64)	15,30
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		Pendidikan			
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		Dinas Pendidikan			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)	(118.119.014.391,64)	15,30
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)	(118.119.014.391,64)	15,30

Jambi, Juni 2018  
Pengguna Anggaran

H. Agus Herianto, SH  
NIP. 19690818 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 01	Pendidikan	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan	
URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	418.819.052.209,53	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	537.362.813.371,51	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(181.118.371.171,19)	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	6.144.170.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	967.740.709.036,14	0,00
EKUITAS AKHIR	858.806.148.042,62	(772.023.211.011,73)

Jambi, Juni 2019  
Pengguna Anggaran

H. Agus Herianto, SH  
NIP. 19690818 199703 1 004



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	i
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	ii
NERACA .....	iii
LAPORAN OPERASIONAL .....	v
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	1
<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	5
<b>Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD .....</b>	<b>7</b>
2.1 Ekonomi Makro.....	7
2.2 Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi .....	8
2.3 Kebijakan Keuangan .....	12
2.4 Indikator pencapaian target kinerja APBD .....	13
<b>Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....</b>	<b>17</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	17
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan .....	21
<b>Bab 4 Kebijakan Akuntansi .....</b>	<b>22</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	22
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	24
<b>Bab 5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan .....</b>	<b>35</b>
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	35
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	44
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	54
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	59
<b>Bab 6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan .....</b>	<b>62</b>
6.1 Domisili .....	62
6.2 Program Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi .....	62
<b>Bab 7 Penutup .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi .....	13
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan .....	17
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung .....	17
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Langsung .....	18
Tabel 5.1	Ringkasan LRA TA 2018 dan 2017 .....	35
Tabel 5.2	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 dan 2017 .....	35
Tabel 5.3	Ringkasan Anggaran dan Realisasi PAD TA 2018 dan 2017 .....	36
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2017 .....	36
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2018 dan 2017 .....	37
Tabel 5.6	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017 .....	37
Tabel 5.7	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2018 dan 2017 .....	38
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 .....	38
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 .....	39
Tabel 5.10	Belanja Barang dan Jasa dari Saldo Dana BOS Tahun 2017 .....	41
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2018 dan 2017 .....	41
Tabel 5.12	Ringkasan Belanja Modal TA 2018 dan 2017 .....	42
Tabel 5.13	Belanja Modal dari Saldo Dana BOS Tahun 2017 .....	43
Tabel 5.14	Ringkasan Saldo Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 dan 2017 .....	44
Tabel 5.15	Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 .....	44
Tabel 5.16	Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2018 dan 2017 .....	45
Tabel 5.17	Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 .....	46
Tabel 5.18	Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 .....	46
Tabel 5.19	Saldo dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018 .....	47
Tabel 5.20	Saldo dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2018 .....	48
Tabel 5.21	Saldo dan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan Tahun 2018 .....	49
Tabel 5.22	Saldo dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 .....	49
Tabel 5.23	Saldo dan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018 .....	50
Tabel 5.24	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 .....	51
Tabel 5.25	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 .....	51
Tabel 5.26	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 .....	52
Tabel 5.27	Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 .....	54
Tabel 5.28	Ringkasan Pendapatan-LO Tahun 2018 dan 2017 .....	54
Tabel 5.29	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018 dan 2017 .....	55
Tabel 5.30	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2018 dan 2017 .....	55
Tabel 5.31	Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan 2017 .....	56
Tabel 5.32	Perhitungan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017 .....	58
Tabel 5.33	Ringkasan LPE Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 .....	59
Tabel 5.34	Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2018 (Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar) .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1 Lampiran XI Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi .....	
Lampiran 5.1 Rekap STS Pengembalian Belanja/Gaji .....	
Lampiran 5.2 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018.....	
Lampiran 5.3 Rincian Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2018 .....	
Lampiran 5.4 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pelaporan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) entitas yaitu :

- 1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
- 2) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan oleh karenanya wajib menyusun Laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Pendidikan berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBD. Basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam Penyajian Laporan Keuangannya terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);

- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu elemen laporan keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, di dalam CaLK juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka Laporan Keuangan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

### **1.2.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

- 1) Kebijakan Keuangan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan Keuangan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan di Jambi.
- 2) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

#### **a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

#### **b. Manajemen**

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### 1.2.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
4. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta hasil-hasil yang telah dicapai.
5. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pengalokasian anggaran.

7. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ini disusun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

- 1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 5 April 2007 Nomor 900/316/BAKD/2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- 12) Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
- 14) Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;

#### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, indikator tersebut adalah:

1. Masukan (Input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan.
2. Keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (Benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
5. Dampak (Impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini akan dominan berbentuk narasi deskriptif dengan penjelasan-penjelasan tambahan yang singkat dan jelas disertai angka-angka yang sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017. Cara penulisan ini diharapkan akan dapat memberi penjelasan yang memadai tentang aktivitas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tergambar melalui laporan keuangan.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dibagi dalam 7 bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan



- 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

**BAB II : Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi
- 2.3. Kebijakan Keuangan
- 2.4. Indikator pencapaian target kinerja APBD

**BAB III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

**BAB IV : Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas akuntansi keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

**BAB V : Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan**

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

**BAB VI : Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan**

**BAB VII : Penutup**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya baik itu pranata politik, pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Disini dapat diamati karakteristik hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkini yang cenderung bersifat kompleks, fungsional, independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah pola hubungan yang bersifat sistemik, konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan cermat.

Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja terdidik semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya

ide link and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah salah satu jalur menuju ke sana.

Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian diharapkan akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal.

## **2.2 Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi**

### **2.2.1 Visi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai Provinsi Jambi dalam periode lima tahun. visi Provinsi Jambi yang akan diwujudkan adalah: **TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA (JAMBI TUNTAS 2021)**

**Visi :TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA**

Mengacu pada Visi Provinsi Jambi dan Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu di bidang Pendidikan maka Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan visi yaitu: **MEWUJUDKAN INSAN CERDAS DAN BERDAYA SAING**

**Visi : MEWUJUDKAN INSAN CERDAS DAN BERDAYA SAING**

Penjelasan tentang arti, atau makna dari kata kunci visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan, mengandung arti "membentuk, atau mendirikan". Dengan demikian, Mewujudkan dalam hal ini diartikan sebagai "aktivitas untuk membentuk, mendirikan sesuatu ke arah yang lebih baik".
- Insan, adalah sebagai suatu konsep yang dimaknai bahwa manusia sebagai makhluk yang paling mulia, memiliki akal dan budi pekerti, memiliki potensi

untuk dibangun ke arah yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

- Cerdas, adalah suatu konsep pencapaian aktualisasi potensi manusia yang mampu mendayagunakan atau mensinergikan kemampuan emosional, akademis/intelektual, dan spritual menjadi kekuatan yang positif yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kesulitan, persoalan, dan masalah yang dihadapi.
- Berdaya Saing, adalah suatu konsep yang diartikan sebagai suatu kondisi individu/kelompok yang memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenangkan suatu persaingan/perlombaan. Dengan demikian Berdaya Saing berarti Sumber Daya Manusia Jambi memiliki kemampuan untuk memenangi dari suatu persaingan atau perlombaan.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat didefenisikan secara operasional tentang Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut : "Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi adalah instansi pemerintah/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jambi yang berupaya untuk mewujudkan penduduk Jambi menjadi manusia yang : (1) memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual; (2) berperilaku sesuai tuntunan agama, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan; (3) memiliki pemahaman sekaligus dapat memanfaatkan IPTEK; ( 4) memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan; (5) memiliki kemampuan/kekuatan untuk melangkah berkompetisi dengan orang atau pihak lain; dan (6) memiliki kemampuan untuk bergaul dan beradaptasi dalam percaturan dunia global yang serba cepat, sehingga terwujud masyarakat Jambi yang sejahtera dan terlepas dari segala kesukaran hidup.

### **2.2.2 Misi**

Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan misi, yaitu :

1. Meningkatkan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan.

2. Optimalisasi kapasitas sumber daya aparatur baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang handal guna tercapainya *good governance* bidang pendidikan.

Penetapan misi tersebut di atas dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

a. Misi Pertama

Misi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan misi pembangunan pemerintah Provinsi Jambi dan tuntutan amanat undang-undang bahwa setiap warganegara dan seluruh penduduk Jambi berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Tuntutan tersebut pada kenyataannya masih belum dapat diwujudkan secara penuh oleh karena beberapasebab antara lain :

- 1) Keterbatasan anggaran pendidikan di Provinsi dan Kabupaten dan Kota.
- 2) Kurangnya sinergitas perencanaan pendidikan.
- 3) Kompetensi guru yang belum maksimal.
- 4) Jumlah penduduk yang menyebar dan luasnya jangkauan wilayah.
- 5) Daya beli masyarakat yang masih rendah.

b. Misi Kedua

Misi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Penyelenggaraan pengelolaan yang baik dan prima dapat dilaksanakan manakala kualitas sumberdaya aparatur pendidik maupun tenaga kependidikan meningkat, maka kinerja kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat ditingkatkan secara optimal.

Permasalahan tersebut di atas tentunya tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, melainkan dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang baik dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jambi serta *stakeholders* pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya, misi yang ditetapkan tersebut mengisyaratkan pentingnya keterlibatan/partisipasi dari berbagai pihak.

Untuk memberikan kebersamaan langkah dalam mencapai tujuan perlu kiranya dirumuskan nilai-nilai instansi yang akan dianut bersama. Nilai-nilai ini harus mampu menggambarkan tata nilai dan falsafah yang dianut bersama dalam melaksanakan tugas-tugas yang nantinya akan terkait erat dengan kegiatan pelayanan yang akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada *stakeholders*/masyarakat.

Pemilihan nilai-nilai tersebut bukan berarti mengesampingkan nilai-nilai luhur lainnya. Berikut nilai-nilai luhur Dinas Pendidikan Provinsi Jambi :

1) Profesionalisme

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya sumber daya manusia yang profesional. Hal ini bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil, dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi organisasi.

Kapabilitas merupakan hal yang sangat krusial bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut mustahil akan dapat direspons dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas dari para pelaksana kegiatan/program/kebijakan organisasi, dan kapabilitas pegawai tidak tumbuh dengan sendirinya melainkan harus melalui suatu proses yang terencana dan berkesinambungan serta didukung dengan penyediaan sarana penunjang yang baik, tepat dan memadai.

Dengan kapabilitas yang tinggi, pegawai akan terpicu untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil. Di samping itu, kapabilitas yang tinggi tersebut akan dapat mendorong terhadap peningkatan integritas moral/etika untuk berinteraksi dengan rekan sejawat, bawahan, atasan, maupun dengan pihak-pihak luar organisasi.

2) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi untuk meyakinkan adanya keharmonisan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Semua elemen organisasi akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Setiap elemen organisasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan dan tidak bekerja secara terkotak-kotak. Selain itu, organisasi tidak bisa hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka.

3) Kemitraan

Di dalam era demokrasi yang sedang berkembang saat ini, pola-pola kerja kemitraan perlu dikembangkan dan diupayakan menghindarkan diri dari pola-pola lama yang menggunakan pendekatan kewenangan (*power approach*) ke pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kebutuhan stakeholder (*stakeholder oriented approach*), sehingga terjalin hubungan yang

harmonis/positif dengan pihak-pihak terkait seperti dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/ Kota, Jajaran Kementrian Agama dan *stakeholders* pendidikan lainnya.

### 2.3 Kebijakan Keuangan

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Pertanggungjawaban keuangan ini digunakan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik sebagai perwujudan asas transparansi, demokrasi dan akuntabilitas dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Dalam pendekatan kinerja, maka usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program, dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan Organisasi Perangkat Daerah harus memuat hal-hal dibawah ini agar dapat dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengalokasian anggaran :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Sebagai pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan anggaran yang diberikan.
8. Sebagai bahan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
	<b><i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i></b>		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Pembayaran Rekening (bulan)	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Rutin Kantor
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Realisasi Serapan Anggaran	Peningkatan SDM Aparatur Pengguna Anggaran
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor ( bulan )	Peningkatan Kualitas Pekerjaan
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Rutin Kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan SDM Aparatur Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penerangan Kantor	Terlaksananya Penerangan Kantor
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memiliki Kreativitas dan Inovasi	Peningkatan Kualitas Aparatur
10	Penyediaan makanan dan minuman	Efisiensi Pelaksana Pekerjaan	Peningkatan SDM Aparatur Pengguna Anggaran dan



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
			Pengelola Keuangan
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Efisiensi Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Aparatur Pengguna Anggaran dan Pengelola Keuangan
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Efisiensi Pengelolaan Administrasi Kegiatan dan Penatausahaan Keuangan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas dan Tepat Sasaran dan SDM Aparatur
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Lebih Efektif dan Efisiensi	Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor
14	Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan gedung kantor	Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Lebih Efektif dan Efisien	Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Lebih Efektif dan Efisien	Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor
16	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Efisiensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	terawatnya gedung kantor
	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		
17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pekerjaan	Peningkatan SDM Aparatur Pengguna Anggaran
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		
18	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Meningkatkan Kinerja di Bidang Administrasi	Menjadikan Tenaga Profesional yang Ahli di Bidangnya
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		
19	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Kinerja Keuangan	Tersusunnya Laporan tahunan dinas pendidikan provinsi Jambi
	<b>Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</b>		
20	Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana PKLK	Tersedianya Sarana Prasarana di Tingkat PKLK	Meningkatnya kualitas belajar
21	Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional	Terpenuhinya kegiatan lomba-lomba ke tingkat nasional Terlaksananya kegiatan lomba tingkat nasional, Meningkatnya kompetensi siswa yang berkebutuhan khusus	meningkatnya kualitas Kompetensi Siswa yang Berkebutuhan Khusus dan Terlaksananya Lomba Tingkat Nasional
22	Penyelenggaraan PKLK	terpenuhinya penyelenggaraan PKLK	meningkatnya kualitas penyelenggaraan PKLK
23	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan PTK	terpenuhinya produk unggulan PKLK	Meningkatnya kualitas belajar
24	Kegiatan Penyelenggaraan PLA	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan autisme	meningkatnya kualitas belajar
	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>		
25	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kependidikan dan Laboran Sekolah	Tenaga Tata usaha dan Laboran Sekolah	Tenaga Tata usaha dan Laboran Yang telah Mengikuti Pelatihan
26	Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan	Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tutor	Terseleksinya 209 Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
	Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Paket A, B, C yang diseleksi	Tingkat Provinsi
27	Kegiatan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawasan Sekolah	Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang dilatih dan diseleksi	Terlatihnya 264 kepala Sekolah dan Pengawas dan terseleksinya 264 Kepala Sekolah dan Pengawas
28	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru	Guru yang Dilatih	Terlatihnya 800 Guru SMA dan SMA Seprov
29	Kegiatan Pembinaan MGMP	Jumlah Guru yang dilatih	Terbinanya Guru Melalui Kelompok Kerja (MGMP)
	<b>Program Pembinaan SMA</b>		
30	Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA	Tersedianya Peralatan SMA	Meningkatnya nilai hasil ujian
31	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	tersedianya penyelenggaraan sekolah berasrama	Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan di Sekolah Asrama
32	Pembinaan Olimpiade Sain Nasional	terlaksananya OSN	meningkatnya kualitas pendidikan di bidang Sains
33	Kegiatan Pembinaan Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan LCC 4 Pilar (SMA)	terlaksananya pembinaan dan seleksi Lomba Debat B. Indonesia, B. Inggris, LCC 4 Pilar dan Karakter Siwa SMA	Tersalurnya Bakat, Minat, Prestasi Siswa SMA
34	Bimtek Pengolahan Dana BOS dan APBN (SMA)	terlaksananya Kegiatan Diklat Pengelolaan Dana BOS	meningkatnya kualitas belajar
35	Kegiatan Rakor Manajemen SMA	Terlaksananya Pelatihan pemantapan peningkatan Guru yang di UN kan Diklat Peningkatan dan Desain Pembelajaran Kurikulum 2013, Diklat Peningkatan kompetensi sekolah penyele	Meningkatnya nilai mata pelajaran yang di UN kan
36	Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA	Tersedianya Meubelair SMA	meningkatnya kualitas belajar
37	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	Meningkatnya rasio siswa denga Ruang Kelas	Meningkatnya Daya Tampung Siswa/Siswi
38	Kegiatan Pembinaan Peserta O2SN dan FLS2N	terlaksananya kegiatan O2SN dan FLS2N	Tersalurnya Minat, Bakat, Prestasi siswa
39	Kegiatan BOS APBN	tersedianya peralatan SMA	meningkatnya nilai hasil ujian
	<b>Program Pembinaan SMK</b>		
40	Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK	Tersedianya Peralatan SMK	Meningkatnya nilai hasil ujian
41	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	Terselenggaranya Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	meningkatnya kualitas belajar
42	Kegiatan Pembangunan/Turaf, Pagar SMK	Terbangunnya Turap dan Pagar Sekolah	Terpenuhinya Sarana Penunjang SMK
43	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Terjaringnya Siswa Berprestasi Bidang Olah Raga	meningkatnya kualitas pendidikan
44	Kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan/Re-Engineering	Terlaksananya Peningkatan Mutu SMK	meningkatnya kualitas belajar
45	Kegiatan Kompetensi Siswa SMK	Terwakili Bidang Keahlian Siswa Tingkat Nasional	meningkatnya kualitas belajar
46	Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional	
47	Pembinaan Sekolah Rujukan/Kerjasama (SMK)	Meningkatkan Mutu Kompetensi Siswa	meningkatnya kualitas belajar
48	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK	Terpenuhinya Rencana Pembangunan RKB	meningkatnya kualitas belajar
49	Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK	Jumlah Meubiler Sekolah	Jumlah Siswa

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN	HASIL
50	Pengembangan Kurikulum K13	Terlaksananya Diklat Kurikulum K13	Meningkatnya kompetensi sekolah penyelenggara Kurikulum 2013
	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		
51	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Lalulintas disekolah	meningkatnya Kesadaran Para Siswa/Siswi untuk mematuhi Aturan yang berlaku
52	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Terlaksananya sosialisasi, advokasi dan pendataan bidang pendidikan	Meningkatnya tata kelola pendidikan
53	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Pengawasan	terlaksananya monitoring dan evaluasi
54	Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Kab./Kota	terlaksananya koordinasi perencanaan pendidikan provinsi jambi	terciptanya persamaan persepsi tentang perencanaan pendidikan antara provinsi dan kab/kota
55	Kegiatan Pembinaan Pramuka	terlaksananya kursus mahir dasar jenjang SMA/SMK	tersedianya pembina jenjang SMA/SMK yang telah mengikuti KMD (kursus mahir dasar)
56	Kegiatan Pembinaan UKS	terlaksananya pembinaan UKS dikabupaten/kota dan provinsi	persentase sekolah sehat di provinsi
57	Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	terlaksananya bimtek guru MA serta Peantren Ramadhan	Tersedianya guru mata pelajaran umum di pondok pesantren yang berkualitas
58	Kegiatan Pengurus Utama Gender	terlaksananya kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Tersedianya Anggaran Responsif Gender di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi
59	Kegiatan Pembinaan Minat Baca	Terlaksananya Lomba Penulisan artikel	Tersedianya artikel yang berkualitas
60	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi TIK Pendidikan	Jumlah guru memiliki kompetensi di Bid. TIK	Meningkatnya kompetensi guru bidang TIK
61	Kegiatan Pengelolaan Jejaring dan Publikasi Pendidikan	Tersedianya data, jaringan dan poblikasi pendidikan	tersedianya data, jaringan dan publikasi pendidikan
62	Kegiatan Produksi TIK Pendidikan	tersedianya sumber belajar berbasis TIK SMA/SMK	tersedianya sumber belajar berbasis TIK SMA/SMK
63	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Pendidikan	Terlaksananya Fasilitas Komputer Dinas Pendidikan dan UNBK	Tersedianya Fasilitas Komputer Dinas Pendidikan dan UNBK
64	Kegiatan PPDB Online	Terlaksananya PPDB Online	Terlayaninya PPDB Online
	<b>Program Beasiswa dan Bosda</b>		
65	Beasiswa	tersedianya Beasiswa Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Jambi
66	Pembayaran PTK NON PNS SMA/SMK	tersedianya Honor PTT PTK Non PNS	Terbayarnya honorarium PTT, PTK Non PNS Jenjang SMA dan SMK Seprovinsi Jambi

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan Daerah	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018	
			Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>122,22</b>

Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp.12.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.15.400.000,00 atau 122,22% dengan rincian sebagai berikut:

1. Retribusi daerah dengan anggaran sebesar Rp.12.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.15.400.000,00 atau 122,22%. Target Retribusi Daerah naik. Kenaikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kenaikan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (lapangan tenis).

##### 3.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Target dan realisasi belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 3.1.2.1 Belanja Tidak Langsung

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Belanja Operasi	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018	
			Jumlah	%
1	Belanja Pegawai	606.850.106.653,13	582.670.970.194,14	96,02
	<b>Total Belanja Pegawai</b>	<b>606.850.106.653,13</b>	<b>582.670.970.194,14</b>	<b>96,02</b>

Berdasarkan capaian realisasi belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 582.670.970.194,14 dari total anggaran sebesar Rp.606.850.106.653,13 atau 96.02%, belanja tidak langsung Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah efisien.

### 3.1.2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Dinas Pendidikan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp423.712.099.000,00 dan terealisasi sebesar Rp385.085.138.842,00 atau 90,88%.

Ringkasan target dan realisasi belanja langsung sebagai berikut.

**Tabel 3.3 Target dan Realisasi Belanja Langsung**

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			KET
			Rp	%	FISIK (%)	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	118.800.000,00	78.020.300,00	65,67	100	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.378.800.000,00	950.038.774,00	68,90	100	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	639.200.000,00	514.462.600,00	80,49	100	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	447.800.000,00	378.334.500,00	84,49	100	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	200.000.000,00	199.825.007,00	99,91	100	
6	Penyediaan alat tulis kantor	317.171.000,00	305.021.000,00	96,17	100	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	737.220.000,00	731.868.000,00	99,27	100	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	156.880.000,00	156.864.000,00	99,99	100	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48.000.000,00	10.720.000,00	22,33	100	Ada pembatalan belanja karena keterlambatan pelaksanaan
10	Penyediaan makanan dan minuman	408.000.000,00	216.378.982,00	53,03	100	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.000.600.000,00	1.000.421.800,00	99,98	100	
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	124.200.000,00	118.250.000,00	95,21	100	
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	354.500.000,00	335.725.000,00	94,70	100	
14	Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan gedung kantor	350.413.973,00	347.007.825,00	99,03	100	
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	466.000.000,00	413.782.000,00	88,79	100	
16	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	606.150.000,00	597.506.000,00	98,57	100	
17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	195.000.000,00	193.050.000,00	99,00	100	

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			KET
			Rp	%	FISIK (%)	
18	Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	233.808.000,00	230.493.125,00	98,58	100	
19	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	464.916.000,00	430.010.000,00	92,49	100	
20	Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana PKLK	2.509.625.000,00	1.928.841.799,00	76,86	100	
21	Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional	1.691.279.500,00	1.386.782.300,00	82,00	100	
22	Penyelenggaraan PKLK	4.991.499.500,00	4.804.624.150,00	96,26	100	
23	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan PTK	1.407.694.500,00	950.494.200,00	67,52	100	
24	Kegiatan Penyelenggaraan PLA	1.205.430.000,00	969.374.788,00	80,42	100	
25	Kegiatan Pelatihan Tenaga Kependidikan dan Laboran Sekolah	1.289.384.486,00	949.130.800,00	73,61	100	
26	Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	2.624.374.500,00	1.757.832.434,00	66,98	100	
27	Kegiatan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawasan Sekolah	4.111.219.190,00	3.197.928.210,00	77,79	100	
28	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru	6.218.274.000,00	5.044.012.002,00	81,12	100	
29	Kegiatan Pembinaan MGMP	6.392.196.900,00	5.434.809.158,00	85,02	100	
30	Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA	9.654.440.020,00	9.579.090.746,00	99,22	100	
31	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	12.488.200.000,00	11.381.174.233,00	91,14	100	
32	Pembinaan Olimpiade Sain Nasional	3.153.058.660,00	2.982.342.258,00	94,59	100	
33	Kegiatan Pembinaan Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan LCC 4 Pilar (SMA)	1.804.364.500,00	1.632.152.500,00	90,46	100	
34	Bimtek Pengolahan Dana BOS dan APBN (SMA)	2.997.959.373,00	1.893.610.899,00	63,16	100	
35	Kegiatan Rakor Manajemen SMA	6.762.431.300,00	5.433.228.060,00	80,34	100	
36	Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA	4.130.250.200,00	3.764.825.946,00	91,15	100	
37	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	34.823.295.107,00	29.315.072.307,00	84,18	100	

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			KET
			Rp	%	FISIK (%)	
38	Kegiatan Pembinaan Peserta O2SN dan FLS2N	3.650.054.500,00	3.374.558.400,00	92,45	100	
39	Kegiatan BOS APBN	152.717.200.000,00	148.469.220.000,00	97,22	100	
40	Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK	18.801.005.000,00	8.714.828.013,00	46,35	100	Belum ada dalam E-Katalog
41	Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama	6.733.515.808,00	6.017.145.863,00	89,36	100	
42	Kegiatan Pembangunan/Turaf, Pagar SMK	6.188.976.000,00	6.123.247.500,00	98,94	100	
43	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	3.379.576.000,00	2.786.059.655,00	82,44	100	
44	Kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan/Re-Engineering	2.685.301.000,00	2.159.774.203,00	80,43	100	
45	Kegiatan Kompetensi Siswa SMK	645.225.000,00	546.189.500,00	84,65	100	
46	Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional	2.319.834.500,00	1.591.409.635,00	68,60	100	
47	Pembinaan Sekolah Rujukan/Kerjasama (SMK)	1.273.480.000,00	1.262.984.800,00	99,18	100	
48	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK	23.254.841.127,00	20.321.344.278,00	87,39	100	
49	Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK	2.398.411.570,00	2.312.992.200,00	96,44	100	
50	Pengembangan Kurikulum K13	3.372.437.500,00	3.035.802.800,00	90,02	100	
51	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan	400.500.000,00	399.250.000,00	99,69	100	
52	Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	213.084.000,00	198.364.000,00	93,09	100	
53	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	312.175.500,00	312.175.500,00	100,00	100	
54	Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Kab./Kota	1.100.941.410,00	950.712.981,00	86,35	100	
55	Kegiatan Pembinaan Pramuka	235.888.500,00	215.618.000,00	91,41	100	
56	Kegiatan Pembinaan UKS	905.254.500,00	868.674.600,00	95,96	100	
57	Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren	1.090.684.500,00	1.059.881.900,00	97,18	100	
58	Kegiatan Pengurus Utama Gender	101.719.500,00	91.713.500,00	90,16	100	
59	Kegiatan Pembinaan Minat Baca	531.863.000,00	480.908.000,00	90,42	100	

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			KET
			Rp	%	FISIK (%)	
60	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi TIK Pendidikan	1.968.496.500,00	1.791.954.275,00	91,03	100	
61	Kegiatan Pengelolaan Jejaring dan Publikasi Pendidikan	2.756.221.500,00	2.742.651.436,00	99,51	100	
62	Kegiatan Produksi TIK Pendidikan	452.502.500,00	444.404.800,00	98,21	100	
63	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Pendidikan	1.048.993.876,00	1.046.442.000,00	99,76	100	
64	Kegiatan PPDB Online	478.365.000,00	474.030.000,00	99,09	100	
65	BEASISWA	15.050.000.000,00	14.871.510.000,00	98,81	100	
66	Pembayaran PTK NON PNS SMA/SMK	53.143.115.000,00	52.808.185.300,00	99,37	100	
<b>TOTAL</b>		<b>423.712.099.000,00</b>	<b>385.085.138.842,00</b>	<b>90,88</b>		

### 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti sehingga realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,62% itu menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan sudah efektif dan efisien.

Khusus untuk pelaksanaan kegiatan BOS ada kendala antara Lain:

1. Jauhnya jarak sekolah yang berakibat pada susah penyampaian laporan dan pertanggungjawaban Penggunaan dana BOS.
2. Keterbatasan Infrastruktur (Ketersediaan Internet) di beberapa sekolah.
3. Masih terbatasnya pemahaman sekolah terhadap pengelolaan Keuangan Daerah (Dana BOS).

Yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

1. Melakukan konsolidasi setiap triwulan atau pada saat setelah pencairan dana BOS di setiap kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi
2. Penyusunan Perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban sudah berbasis Web atau menggunakan Aplikasi Sip BOS yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat 2 (dua) entitas penyelenggara yaitu :

- a. **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- b. **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan yaitu pemerintahan daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan dan entitas pelaporan yang ada di Provinsi Jambi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terdiri dari :

##### **4.1.1 Laporan Realisasi APBD**

Laporan Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA Dinas Pendidikan Prov. Jambi disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi berbasis Kas.

- Angka Realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2018 berdasarkan semua aliran kas masuk berupa penerimaan pada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan Prov. Jambi yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- Angka Realisasi Belanja Daerah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2018 berdasarkan semua aliran kas keluar berupa pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

- Angka Realisasi Pembiayaan pada Dinas Pendidikan Prov. Jambi tidak disajikan.

#### **4.1.2 Laporan Operasional**

Menurut paragraf 78 kerangka konseptual SAP adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Pelaporan ini disusun berdasarkan basis akrual.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan dalam paragraf 79 kerangka konseptual SAP sebagai berikut:

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pada Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak terdapat transfer sehingga tidak disajikan.
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **4.1.3 Neraca**

Neraca Dinas Pendidikan Provinsi Jambi disusun berdasarkan data kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu dan setara kas lainnya, data aset dan persediaan selama tahun 2018, dan data kewajiban yang terjadi pada tahun 2018. Neraca yang disajikan pada laporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode 31 Desember 2018.

#### **4.1.4 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

CaLK adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional

(LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### **4.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini berdasarkan Paragraf 101 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang antara lain menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Mengacu kepada ketentuan dalam SAP tersebut, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi TA 2018 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional (LO) serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### **4.3.1 Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diakui pada saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan. Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan OPD harus disetor ke rekening kas umum daerah pada hari yang sama. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.3.2 Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jambi. Belanja terdiri atas :

##### **1) Belanja Gaji dan Tunjangan**

Pencatatan belanja adalah sebesar nilai brutonya. Jika terdapat potongan pajak dari BUD, belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan pengakuan potongan pajak terdapat di BUD. Jika terdapat potongan pajak di OPD, belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan terdapat penjurnalan potongan pajak di OPD.

##### **2) Belanja Barang dan Jasa**

Pengakuan Belanja Barang dan Jasa adalah pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembelian dan pembayaran. Jika terdapat pungutan pajak dan dipungut oleh OPD maka dicatat sebagai hutang oleh OPD.

##### **3) Belanja Modal**

Pencatatan pada rekening - rekening buku besar belanja modal dimulai sejak bendahara pengeluaran merealisasikan belanja modal hingga penutupan tahun anggaran.

#### **4.3.3 Pendapatan dalam Laporan Operasional**

Pendapatan dalam Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jambi diakui pada saat diterima pada saat terjadinya transaksi. Yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau sesuai dengan Surat Perjanjian.

#### 4.3.4 Beban

Beban dalam Laporan Operasional Dinas Pendidikan Prov. Jambi diakui pada saat diterima pada saat terjadinya transaksi. Yaitu pada saat terbitnya Berita Acara Penyerahan Pekerjaan untuk pengadaan jasa dan Berita Acara Penerimaan barang untuk pengadaan barang.

#### 4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya

##### 4.3.5.1 Aset Lancar

Pengertian Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Terdiri dari :

- **Kas dan setara kas**

Kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam dan saldo rekening giro di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengertian Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/ Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan.

- **Piutang**

Piutang adalah tagihan kepada pihak ke tiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan.

Piutang dinilai berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo. Tidak ada kebijakan untuk penyisihan piutang tak tertagih.

- **Persediaan**

Persediaan adalah barang- barang yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan/ dijual kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

**4.3.5.2 Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :

- **Investasi Non Permanen**

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

- **Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah atau Badan Hukum Lainnya.

#### **4.3.5.3 Aset Tetap**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam Aset Tetap pemerintah adalah Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan

yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut: (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas; (2) Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke atas (3) Aset tetap lainnya terdiri dari Buku dan perpustakaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke atas dan Hewan/ternak dan tumbuhan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset



Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (reevaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

- 1) *Tanah*. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Nilai tanah meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 2) *Peralatan dan Mesin*. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 3) *Gedung dan Bangunan*. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

gedung dan bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

- 4) *Jalan, Irigasi dan Jaringan*. Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
- 5) *Aset Tetap Lainnya*. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 6) *Konstruksi dalam Penyelesaian*. Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
- 7) *Penyusutan*. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa Aset Tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap. Nilai penyusutan per periode merupakan nilai perolehan/penilaian dibagi dengan masa manfaat. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 4.1**.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilaksanakan secara tahunan, dan Aset Tetap dianggap berumur 1 (satu) tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- 1) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;

- 2) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- 3) Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- 4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak disusutkan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tanaman.

*Penilaian Awal Aset Tetap.* Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

#### **4.3.5.4 Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran Rumah, Tagihan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain dan atau mutasi dari aset tetap yang telah diinventarisir untuk dihapuskan karena aset tersebut secara fisik sudah tidak dapat dioperasikan. Aset lainnya terdiri dari :

- **Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- **Tagihan Ganti Rugi (TGR)** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang

melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

- **Kemitraan dengan pihak ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- **Aset Tak Berwujud** merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

#### 4.3.5.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan :

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

#### **4.3.5.6 Ekuitas**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## BAB V

### PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas pelaksanaan APBD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja dalam satu tahun anggaran (TA). Ringkasan LRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 5.1.01 berikut.

**Tabel 5.1 Ringkasan LRA TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
1	Pendapatan	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22	6.579.493.820,00
2	Belanja	1.030.562.205.653,13	985.496.046.839,14	95,63	832.786.437.627,00
3	Surplus (Defisit)	(1.030.549.605.653,13)	(985.480.646.839,14)	95,63	826.206.943.807,00
4	SILPA	(1.030.549.605.653,13)	(985.480.646.839,14)	95,63	826.206.943.807,00

Penjelasan atas pos-pos LRA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi TA 2018 dan 2017 sebagai berikut.

##### 5.1.1 Pendapatan

###### TA 2018

**Rp 15.400.000,00**

###### TA 2017

**Rp 6.579.493.820,00**

Pendapatan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp12.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.400.000,00 atau sebesar 122,22%. Jumlah realisasi Pendapatan TA 2018 tersebut turun sebesar Rp6.564.093.820,00 atau 99,77% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2017 sebesar Rp6.579.493.820,00. Penurunan Pendapatan ini disebabkan pada tahun 2017 terdapat Pendapatan luar biasa

Pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.2 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan Daerah	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Asli Daerah	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22	10.800.000,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	6.568.693.820,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>122,22</b>	<b>6.579.493.820,00</b>

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

**TA 2018**

**Rp15.400.000,00**

**TA 2017**

**Rp10.800.000,00**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2018 dianggarkan sebesar Rp12.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.400.000,00 atau 122,22%. Jumlah realisasi PAD TA 2018 naik sebesar Rp4.600.000,00 atau 70,13% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2017 sebesar Rp10.800.000,00. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan antara lain karena meningkatnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.

PAD terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Adapun ringkasan dan penjelasan masing-masing pos PAD tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3 Ringkasan Anggaran dan Realisasi PAD TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian Jenis PAD	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22	10.800.000,00
2	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>122,22</b>	<b>10.800.000,00</b>

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

**TA 2018**

**Rp15.400.000,00**

**TA 2017**

**Rp10.800.000,00**

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dianggarkan sebesar Rp12.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.400.000,00 atau sebesar 122,22%. Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2018 tersebut naik sebesar Rp4.600.000,00 atau 70,13% dibandingkan TA 2017 sebesar Rp10.800.000,00. Kenaikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kenaikan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (lapangan tenis). Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
I.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>122,22</b>	<b>10.800.000,00</b>
1	Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga (lapangan tenis)	12.600.000,00	15.400.000,00	122,22	10.800.000,00

#### 5.1.1.2 Lain-lain Pendapatan yang Sah

**TA 2018**

**Rp0,00**

**TA 2017**

**Rp6.568.693.820,00**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2018 adalah sebesar Rp0,00. Atau turun sebesar Rp6.568.693.820,00 atau sebesar 100% dibandingkan dengan TA 2017. Penurunan Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2018 tersebut karena tahun 2018 tidak ada Pendapatan Luar Biasa.

**Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Lain-Lain Pendapatan	Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2018
			Jumlah	%	
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.568.693.820,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.693.820,00</b>

#### 5.1.2 Belanja

**TA 2018**

**Rp985.496.046.839,14**

**TA 2017**

**Rp832.786.437.627,00**

Belanja Dinas Pendidikan TA 2018 dianggarkan sebesar Rp1.030.562.205.653,13 dan terealisasi sebesar Rp985.496.046.839,14 atau 95,63%. Jumlah realisasi Belanja TA 2018 tersebut naik sebesar Rp152.709.609.212,14 atau 18,34% dibandingkan realisasi Belanja Dinas Pendidikan TA 2017 sebesar Rp832.786.437.627,00. Kenaikan realisasi Belanja Dinas Pendidikan TA 2018 disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Realisasi Belanja Dinas Pendidikan TA 2018 merupakan jumlah belanja yang telah dibayar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sepanjang TA 2018, terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Ringkasan anggaran dan realisasi serta penjelasan atas masing-masing pos Belanja Daerah TA 2018 sebagai berikut.

**Tabel 5.6 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Belanja Daerah	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
1	Belanja Operasi	915.815.454.650,13	887.762.411.684,14	96,94	761.012.808.660,00
2	Belanja Modal	114.746.751.003,00	97.733.635.155,00	85,17	71.773.628.967,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.030.562.205.653,13</b>	<b>985.496.046.839,14</b>	<b>95,63</b>	<b>832.786.437.627,00</b>



### 5.1.2.1 Belanja Operasi

#### TA 2018

**Rp887.762.411.684,14**

#### TA 2017

**Rp761.012.808.660,00**

Belanja Operasi TA 2018 dianggarkan sebesar Rp915.815.454.650,13 dan terealisasi sebesar Rp887.762.411.684,14 atau 96,94%. Jumlah realisasi Belanja Operasi TA 2018 tersebut naik sebesar Rp126.749.603.024,14 atau 16,66% dibandingkan TA 2017 sebesar Rp761.012.808.660,00. Kenaikan realisasi Belanja Operasi TA 2018 disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Ringkasan Belanja Operasi TA 2018 sebagai berikut.

**Tabel 5.7 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Belanja Operasi	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
1	Belanja Pegawai	606.850.106.653,13	582.670.970.194,14	96,02	503.306.517.731,00
2	Belanja Barang	308.965.347.997,00	305.091.441.490,00	98,75	256.938.666.847,00
3	Hibah	0,00	0,00	0,00	767.624.082,00
	Jumlah	915.815.454.650,13	887.762.411.684,14	96,94	761.012.808.660,00

### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

#### TA 2018

**Rp582.670.970.194,14**

#### TA 2017

**Rp503.306.517.731,00**

Belanja Pegawai TA 2018 dianggarkan sebesar Rp606.850.106.653,13 dan terealisasi sebesar Rp582.670.970.194,14 atau 96,02%. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tersebut naik sebesar Rp79.364.452.463,14 atau 15,77% dibandingkan TA 2017 sebesar Rp503.306.517.731,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai TA 2018 disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 sebagai berikut

**Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Belanja Pegawai	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	282.107.814.809,13	272.431.079.100,00	96,57	275.207.577.162,00

No	Uraian Belanja Pegawai	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
2	Tunjangan Keluarga	27.186.276.894,00	26.314.980.995,00	96,80	24.559.107.959,00
3	Tunjangan Jabatan	1.231.947.381,00	448.260.000,00	36,39	307.865.000,00
4	Tunjangan Fungsional	26.332.818.450,00	24.805.375.000,00	94,20	23.678.725.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	2.235.026.429,00	1.968.530.000,00	88,08	1.875.945.000,00
6	Tunjangan Beras	14.957.742.672,00	14.298.532.380,00	95,59	14.504.567.280,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.707.484,00	78.456.169,00	81,97	66.311.966,00
8	Pembulatan Gaji	4.029.080,00	3.562.281,00	88,41	3.395.650,00
9	Iuran Asuransi Kesehatan	8.028.746.144,00	7.669.101.173,00	95,52	7.755.622.749,00
10	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	582.831.539,00	559.500.012,00	96,00	566.057.155,00
11	Belanja Jaminan Kematian	2.075.383.021,00	2.075.383.021,00	100,00	707.587.531,00
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	96.084.226.750,00	87.097.635.936,00	90,65	6.470.811.079,00
13	Tunjangan Profesi Guru	145.315.848.000,00	145.073.559.800,00	99,83	142.793.885.400,00
14	Tunjangan Penghasilan Guru	558.000.000,00	329.250.000,00	59,01	4.726.500.000,00
15	Tunjangan Khusus Guru	53.708.000,00	37.987.200,00	70,73	70.558.800,00
16	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		(520.222.872,86)		
		606.850.106.653,13	582.670.970.194,14	96,02	503.294.517.731

Dari jumlah realisasi Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp.582.670.970.194,14 tersebut, terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.520.222.872,86. Rincian Pengembalian dimuat pada **Lampiran 5.1**

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang

##### TA 2018

**Rp305.091.441.490,00**

##### TA 2017

**Rp256.938.666.847,00**

Belanja Barang TA 2018 dianggarkan sebesar Rp308.965.347.997,00 dan terealisasi sebesar Rp305.091.441.490,00 atau 98,75%. Jumlah realisasi Belanja Barang TA 2018 tersebut naik sebesar Rp 48.152.774.643,00 atau 18,74% dibandingkan TA 2017 sebesar Rp256.938.666.847,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang TA 2018 disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Belanja Makanan dan Minuman serta Belanja Beasiswa. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017**

No.	Uraian Belanja Barang	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
1	Honorarium PNS	3.766.891.100,00	3.033.644.100,00	80,53	2.916.814.300,00
2	Honorarium Non PNS	57.769.600.000,00	57.364.439.000,00	99,30	64.633.742.500,00
3	Belanja Bahan Pakai Habis	3.444.550.100,00	2.816.864.000,00	81,78	2.661.748.800,00

(Dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian Belanja Barang	Anggaran Tahun 2018	Realisasi TA 2018		Realisasi TA 2017
			Jumlah	%	
4	Belanja Bahan/Material	2.459.173.590,00	2.215.529.013,00	90,09	8.489.178.140,00
5	Belanja Jasa Kantor	9.047.100.000,00	7.381.878.784,00	81,59	15.637.722.907,00
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	697.900.000,00	573.162.600,00	82,13	504.063.500,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.260.160.120,00	1.607.906.000,00	71,14	1.844.183.550,00
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	220.900.000,00	107.600.000,00	48,71	2.652.800.000,00
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	136.400.000,00	56.800.000,00	41,64	99.350.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	206.800.000,00	109.150.000,00	52,78	141.200.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	27.615.200.908,00	24.734.249.832,00	89,57	12.170.530.941,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	544.980.000,00	542.090.000,00	99,47	442.901.300,00
13	Belanja Pakaian Kerja	49.500.000,00	49.500.000,00	100,00	33.750.000,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.206.865.000,00	1.101.059.800,00	91,23	966.719.000,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	8.315.023.516,00	5.843.419.521,00	70,28	4.199.240.014,00
16	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	713.808.000,00	212.080.400,00	29,71	235.000.000,00
17	Belanja Pemeliharaan	1.053.459.973,00	980.053.442,00	93,03	701.845.000,00
18	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	129.675.000,00
19	Belanja Barang Dana BOS	137.657.380.000,00	133.866.268.000,00	97,25	127.056.320.000,00
20	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	767.624.082,00
21	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	7.395.993.000,00	6.251.315.000,00	84,52	4.575.152.720,00
22	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	326.052.000,00
23	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.824.350.000,00	1.645.300.000,00	90,19	1.660.140.000,00
24	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	27.779.312.690,00	23.308.092.206,00	83,90	19.823.927.317,00
25	Belanja Beasiswa	14.800.000.000,00	14.697.240.000,00	99,31	70.600.000,00
26	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS yang didanai dengan Saldo Kas BOS di Sekolah		16.593.799.792,00		0,00
	Jumlah	301.895.844.243,00	305.091.441.490,00	98,75	272.740.281.071,00

Dari realisasi Belanja Barang TA 2018 sebesar Rp305.091.441.490,00, termasuk didalamnya Belanja Barang dan Jasa Dana BOS yang didanai dengan Saldo Kas BOS di Sekolah Tahun 2017 sebesar Rp16.593.799.792,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa dari Saldo Dana BOS Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 5.10 Belanja Barang dan Jasa dari Saldo Dana BOS Tahun 2017**

NO	NAMA SEKOLAH	BELANJA BARANG JASA
1	BATANGHARI	1.664.669.180,00
2	BUNGO	2.590.635.270,00
3	KERINCI	193.619.724,00
4	MERANGIN	2.110.917.924,00
5	MUARO JAMBI	985.720.011,00
6	SAROLANGUN	1.601.342.996,00
7	TANJUNG JABUNG BARAT	1.463.600.131,00
8	TANJUNG JABUNG TIMUR	65.790.931,00
9	TEBO	2.060.648.821,00
10	KOTA JAMBI	3.745.172.365,00
11	SUNGAI PENUH	111.682.439,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.593.799.792,00</b>

#### 5.1.2.1.3 Hibah

##### TA 2018

**Rp0,00**

##### TA 2017

**Rp767.624.082,00**

Hibah TA 2018 tidak dianggarkan. Sedangkan realisasi Hibah TA 2017 sebesar Rp767.624.082,00. Rincian anggaran dan realisasi Hibah TA 2018 dan 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)					
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2018		Realisasi
	Hibah	Tahun 2018	Jumlah	%	TA 2017
1	Hibah	0,00	0,00	0,00	767.624.082,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	767.624.082,00

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

##### TA 2018

**Rp97.733.635.155,00**

##### TA 2017

**Rp71.773.628.967,00**

Belanja Modal TA 2018 dianggarkan sebesar Rp114.746.751.003,00 dan terealisasi sebesar Rp97.733.635.155,00 atau sebesar 85,17%. Jumlah realisasi Belanja Modal TA 2018 tersebut naik sebesar Rp25.960.006.188,00 atau 36,17% dibandingkan TA 2017 sebesar Rp71.773.628.967,00.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode, meliputi antara lain belanja

modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya. Ringkasan Belanja Modal sebagai berikut.

**Tabel 5.12 Ringkasan Belanja Modal TA 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2018		Realisasi
	Belanja Modal	Tahun 2018	Jumlah	%	TA 2017
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	37.185.160.896,00	26.665.499.259,00	71,71	22.399.357.316,00
3	Gedung dan Bangunan	62.431.770.107,00	55.249.312.885,00	88,50	35.794.949.400,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.000.000,00	69.733.000,00	99,62	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	15.059.820.000,00	15.749.090.011,00	104,58	13.579.322.251,00
	Jumlah	114.746.751.003,00	97.733.635.155,00	85,17	71.773.628.967,00

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

**TA 2018**

**Rp0,00**

**TA 2017**

**Rp0,00**

Jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**TA 2018**

**Rp26.665.499.259,00**

**TA 2017**

**Rp22.399.357.316,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp37.185.160.896,00 dengan realisasi sebesar Rp26.665.499.259,00 atau sebesar 71,71%. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2018 naik sebesar Rp4.266.141.943,00 atau sebesar 19,05% jika dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp22.399.357.316,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dimuat pada **Lampiran 5.2**.

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**TA 2018**

**Rp55.249.312.885,00**

**TA 2017**

**Rp35.794.949.400,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar 62.431.770.107,00 dengan realisasi sebesar Rp55.249.312.885,00 atau 88,50%. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 naik sebesar Rp19.454.363.485,00 atau sebesar 54,35% jika dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp35.794.949.400,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dimuat pada **Lampiran 5.3**.

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

TA 2018	TA 2017
<b>Rp69.733.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp69.733.000,00 atau sebesar 99,62%. TA 2017 Belanja Modal, Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak dianggarkan. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 dimuat pada **Lampiran 5.4**.

#### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

TA 2018	TA 2017
<b>Rp15.749.090.011,00</b>	<b>Rp14.197.540.000,00</b>

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp15.059.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.749.090.011,00 atau sebesar 104,58%. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2018 meningkat sebesar Rp1.551.550.011,00 atau sebesar 10,93% jika dibandingkan dengan TA 2017 sebesar Rp14.197.540.000,00. Realisasi TA 2018 lebih besar dari anggaran disebabkan oleh adanya Penambahan Belanja Modal dana BOS yang didanai dengan Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2017 sebesar Rp1.146.138.011,00. Rincian Belanja Modal dari Saldo Dana BOS Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 5.13 Belanja Modal dari Saldo Dana BOS Tahun 2017**

NO	NAMA SEKOLAH	BELANJA MODAL
1	BATANGHARI	513.473.361,00
2	BUNGO	(25.493.600,00)
3	KERINCI	(2.746.000,00)
4	MERANGIN	235.759.926,00
5	MUARO JAMBI	(106.209.327,00)
6	SAROLANGUN	309.488.111,00
7	TANJUNG JABUNG BARAT	117.500.667,00
8	TANJUNG JABUNG TIMUR	(29.715.450,00)
9	TEBO	148.728.933,00
10	KOTA JAMBI	85.124.292,00
11	SUNGAI PENUH	(99.772.902,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.146.138.011,00</b>

## 5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada akhir periode pelaporan, yaitu 31 Desember 2018.

### 5.2.1 Aset

**31 Desember 2018**

**Rp858.928.530.567,62**

**31 Desember 2017**

**Rp425.087.970.974,53**

Saldo Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp858.928.530.567,62, naik sebesar Rp433.840.559.593,09 atau 102,06% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp425.087.970.974,53. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Aset diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.14 Ringkasan Saldo Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik (Turun)	%
1	Aset Lancar	4.471.801.508,00	22.211.097.711,00	(17.739.296.203,00)	79,87
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap	730.000.703.106,62	278.420.847.310,53	451.579.855.796,09	162,19
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	124.456.025.953,00	124.456.025.953,00	0,00	0,00
	Jumlah	858.928.530.567,62	425.087.970.974,53	433.840.559.593,09	102,06

#### 5.2.1.1. Aset Lancar

**31 Desember 2018**

**Rp4.471.801.508,00**

**31 Desember 2017**

**Rp22.211.097.711,00**

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.471.801.508,00, turun sebesar Rp17.739.296.203,00 atau 79,87% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.211.097.711,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.15 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik (Turun)	%
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara BOS	4.468.963.908,00	22.208.901.711,00	(17.739.937.803,00)	79,88
4	Persediaan	2.837.600,00	2.196.000,00	641.600,00	29,22
	Jumlah	4.471.801.508,00	22.211.097.711,00	(17.739.296.203,00)	79,87

#### 5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

**31 Desember 2018**

**31 Desember 2017**

**Rp0,00**

**Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

#### 5.2.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

**31 Desember 2018**

**31 Desember 2017**

**Rp0,00**

**Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

#### 5.2.1.1.3 Kas di Bendahara Dana BOS

**31 Desember 2018**

**31 Desember 2017**

**Rp4.468.963.908,00**

**Rp22.208.901.711,00**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.468.963.908,00, turun sebesar Rp17.739.937.803,00 atau 79,88% dibandingkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.208.901.711,00. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS tersebut, merupakan akumulasi sisa Dana BOS tahun berkenaan dan tahun sebelumnya pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Jambi. Rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOS sebagai berikut

**Tabel 5.16 Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Kab/Kota	Saldo BOS TA. 2017	Pembayaran Berdasarkan SP2D dana BOS TA. 2018	Realisasi dana BOS TA. 2018	Saldo BOS TA. 2018
1	BATANGHARI	2.243.421.171,00	12.200.240.000,00	14.378.382.541,00	65.278.630,00
2	BUNGO	2.829.186.352,00	15.776.816.000,00	18.341.957.670,00	264.044.682,00
3	KERINCI	1.011.732.025,00	8.931.440.000,00	9.122.313.724,00	787.812.974,00
4	MERANGIN	2.982.057.189,00	15.839.076.000,00	18.185.753.850,00	635.379.339,00
5	MUARO JAMBI	935.754.685,00	15.241.960.000,00	16.121.470.684,00	56.244.001,00
6	SAROLANGUN	2.063.749.456,00	11.603.240.000,00	13.514.071.107,00	152.918.349,00
7	TANJUNG JABUNG BARAT	1.621.940.202,00	12.080.328.000,00	13.661.428.798,00	40.839.404,00
8	TANJUNG JABUNG TIMUR	210.061.416,00	8.138.160.000,00	8.174.235.481,00	173.985.935,00
9	TEBO	2.243.058.855,00	12.637.400.000,00	14.846.777.754,00	33.681.101
10	KOTA JAMBI	3.875.698.569,00	27.093.160.000,00	30.923.456.657,00	45.401.912,00
11	SUNGAI PENUH	2.192.241.791,00	8.927.400.000,00	8.939.309.537,00	2.213.377.581,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.208.901.711,00</b>	<b>148.469.220.000,00</b>	<b>166.209.157.803,00</b>	<b>4.468.963.908,00</b>



#### 5.2.1.1.4 Persediaan

**31 Desember 2018**

**Rp2.837.600,00**

**31 Desember 2017**

**Rp2.196.000,00**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.837.600,00 turun sebesar Rp641.600,00 atau 29,22% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.196.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.17 Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	31-Des-18	31-Des-17	Naik (Turun)	%
1	Alat Tulis Kantor	1.252.600,00	826.000,00	426.600,00	51,65
2	Cetak	1.585.000,00	1.370.000,00	215.000,00	15,69
	Jumlah	2.837.600,00	2.196.000,00	641.600,00	29,22

#### 5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

**31 Desember 2018**

**Rp0,00**

**31 Desember 2017**

**Rp0,00**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

#### 5.2.1.3. Aset Tetap

**31 Desember 2018**

**Rp730.000.703.106,62**

**31 Desember 2017**

**Rp278.420.847.310,53**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp Rp730.000.703.106,62 naik sebesar Rp451.579.855.796,09 atau sebesar 162,19% dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp278.420.847.310,53 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.18 Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik (Turun)	%
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	192.331.943.039,92	83.695.941.666,06	108.636.001.373,86	129,80
3	Gedung dan Bangunan	667.864.554.772,19	174.087.877.990,32	493.776.676.781,87	283,64
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.305.931.347,21	5.847.906.600,00	2.458.024.747,21	42,03
5	Aset Tetap Lainnya	159.002.320.401,03	129.755.312.709,46	29.247.007.691,57	22,54
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.018.028.932,00	1.039.291.000,00	978.737.932,00	94,17
7	Akumulasi Penyusutan	-299.522.075.385,73	-116.005.482.655,31	-183.516.592.730,42	158,20
	Jumlah	730.000.703.106,62	278.420.847.310,53	451.579.855.796,09	162,19

#### 5.2.1.3.1 Tanah

**31 Desember 2018**  
**Rp0,00**

**31 Desember 2017**  
**Rp0,00**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

#### 5.2.1.3.2 Peralatan dan Mesin

**31 Desember 2018**

**31 Desember 2017**

**Rp192.331.943.039,92**

**Rp83.695.941.666,06**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp192.331.943.039,92 naik sebesar Rp108.636.001.373,86 atau 129,80% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp83.695.941.666,06 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.19 Saldo dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2018**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2017	83.695.941.666,06
2	Mutasi Tambah :	116.328.966.633,68
2.1	Belanja Modal TA 2018	26.665.499.259,00
2.2	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
2.3	Reklasifikasi Dari KIB C	1.079.931.146,65
2.4	Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D)	88.583.536.228,03
3	Mutasi Kurang:	7.692.965.259,76
3.1	Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset	7.692.965.259,76
4	Saldo per 31 Desember 2018 (4=1+2-3)	192.331.943.039,98

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.116.328.966.633,68 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 26.665.499.259,00
2. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.079.931.146,65,-
3. Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) sebesar Rp. 88.583.536.228,03.

Mutasi Kurang Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.692.965.259,76 adalah Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset.

Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) tersebut, sampai dengan pembuatan laporan keuangan ini masih dalam proses verifikasi.

#### 5.2.1.3.3 Gedung dan Bangunan

**31 Desember 2018**

**Rp667.864.554.772,19**

**31 Desember 2017**

**Rp174.087.877.990,32**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp667.864.554.772,19 naik sebesar Rp493.776.676.781,87 atau 283,64% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp174.087.877.990,32 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.20 Saldo dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2018**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>174.087.877.990,32</b>
<b>2</b>	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>495.953.655.396,87</b>
2.1	Belanja Modal TA 2018	55.249.312.885,00
2.2	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
2.3	Reklasifikasi Kelompok Aset	0,00
2.4	Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D)	440.704.342.511,87
<b>3</b>	<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>2.176.978.615,00</b>
3.1	Koreksi Kapitalisasi Setelah Perolehan Awal	0,00
3.2	Reklasifikasi Ke KIB B (Intra)	1.079.931.146,65
3.3	Reklasifikasi Ke KIB B (Extra)	897.347.468,35
3.4	Reklasifikasi ke KIB D	199.700.000,00
<b>4</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (4=1+2-3)</b>	<b>667.864.554.772,19</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp495.953.655.396,87 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp55.249.312.885,00.
2. Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) sebesar Rp440.704.342.511,87.

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp2.176.978.615,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke KIB B (Peralatan dan Mesin) Intra sebesar Rp.1.079.931.146,65.
2. Reklasifikasi ke KIB B (Peralatan dan Mesin) Extra sebesar Rp.897.347.468,35.
3. Reklasifikasi ke KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) sebesar Rp.199.700.000,00.

Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) tersebut, sampai dengan pembuatan laporan keuangan ini masih dalam proses verifikasi.

#### 5.2.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

**31 Desember 2018**

**Rp8.305.931.347,21**

**31 Desember 2017**

**Rp5.847.906.600,00**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.305.931.347,21 naik sebesar Rp Rp2.458.024.747,21 atau 42,03% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.847.906.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.21 Saldo dan Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan Tahun 2018**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>5.847.906.600,00</b>
<b>2</b>	<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>2.458.024.747,21</b>
2.1	Belanja Modal TA 2018	69.733.000,00
2.2	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
2.3	Reklasifikasi dari KIB C	199.700.000,00
2.4	Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D)	2.188.591.747,21
<b>3</b>	<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
3.2	Reklasifikasi Kelompok Aset	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (4=1+2-3)</b>	<b>8.305.931.347,21</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp2.458.024.747,21 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp69.733.000,00.
2. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.199.700.000,00
3. Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) sebesar Rp2.188.591.747,21.

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau nihil.

Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) tersebut, sampai dengan pembuatan laporan keuangan ini masih dalam proses verifikasi.

#### 5.2.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

**31 Desember 2018**

**Rp159.002.320.401,03**

**31 Desember 2017**

**Rp129.755.312.709,46**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar **Rp159.002.320.401,03** naik sebesar Rp 29.247.007.691,57 atau 22,54 % dibandingkan saldo 31 Desember 2017 sebesar **Rp129.755.312.709,46** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.22 Saldo dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2018**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2017	129.755.312.709,46
2	Mutasi Tambah :	29.247.007.691,57
2.1	Belanja Modal TA 2018	15.749.090.011,00
2.2	Reklasifikasi Kelompok Aset	0,00
2.3	Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D)	13.497.917.680,57
3	Mutasi Kurang:	0,00
3.1	Reklasifikasi Kelompok Aset	0,00
4	Saldo per 31 Desember 2018 (4=1+2-3)	159.002.320.401,03

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp29.247.007.691,57 terdiri dari :

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.749.090.011,00 berbeda dengan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran Rp8.798.362.894,00 dikarenakan Belanja modal di neraca tidak mengakui belanja BOS buku sebesar Rp1.220.651.972,00.
2. Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) sebesar Rp13.497.917.680,57.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau nihil.

Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) tersebut, sampai dengan pembuatan laporan keuangan ini masih dalam proses verifikasi.

#### 5.2.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

**31 Desember 2018**

**Rp2.018.028.932,00**

**31 Desember 2017**

**Rp1.039.291.000,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.018.028.932,00 naik sebesar 978.737.932,00 atau 94,17% dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.039.291.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.23 Saldo dan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2018**

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2017	1.039.291.000,00
2	Mutasi Tambah :	978.737.932,00
2.1	Belanja Modal TA 2018	0,00
2.2	Reklasifikasi Kelompok Aset	0,00
2.3	Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi	978.737.932,00

<b>3</b>	<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>0,00</b>
3.1	Reklasifikasi Kelompok Aset	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2018 (4=1+2-3)</b>	<b>2.018.028.932,00</b>

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2018 sebesar Rp978.737.932,00 berasal dari Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi.

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau nihil.

Aset SMA-SMK Kab/Kota yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jambi (P2D) tersebut, sampai dengan pembuatan laporan keuangan ini masih dalam proses verifikasi.

#### 5.2.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>
<b>(Rp.299.522.075.385,73)</b>	<b>(Rp116.005.482.655,31)</b>

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar (Rp.299.522.075.385,73) naik sebesar (Rp183.516.592.730,42) atau 158,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar (Rp116.005.482.655,31). Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018 sebagai berikut.

**Tabel 5.24 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018**

(Dalam Rupiah)					
<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2018</b>	<b>31 Desember 2017</b>	<b>Naik (Turun)</b>	<b>%</b>
1	Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(140.805.881.699,43)	(74.858.113.933,51)	(65.947.767.765,92)	88,10
2	Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(157.182.988.559,04)	(40.239.043.993,04)	(116.943.944.566,00)	290,62
3	Akm. Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan	(1.533.205.127,26)	(908.324.728,76)	(624.880.398,50)	68,79
<b>Jumlah</b>		<b>(299.522.075.385,73)</b>	<b>(116.005.482.655,31)</b>	<b>(183.516.592.730,42)</b>	<b>158,20</b>

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.( 140.805.881.699,43) naik sebesar Rp.( 65.947.767.765,92) atau 88,10% dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp.(74.858.113.933,51).
2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp(157.182.988.559,04) turun sebesar Rp(116.943.944.566,00) atau 290,62% dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp(40.239.043.993,04)
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp(1.533.205.127,26) naik sebesar Rp(624.880.398,50) atau 68,79% dibandingkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp(908.324.728,76).

#### 5.2.1.4. Aset Lainnya

31 Desember 2018

31 Desember 2017

**Rp124.456.025.953,00**

**Rp124.456.025.953,00**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp124.456.025.953,00 sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp124.456.025.953,00. Rincian dan penjelasan Aset Lainnya sebagai berikut.

**Tabel 5.25 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian Aset Lainnya	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Naik (Turun)	%
1	Aset Tak Berwujud	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-Lain	124.456.025.953,00	124.456.025.953,00	0,00	0,00
3	Akumulasi Amortisasi	(2.400.000.000,00)	(2.400.000.000,00)	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>124.456.025.953,00</b>	<b>124.456.025.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.400.000.000,00, sama dengan Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017.
2. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp124.456.025.953,00 sama dengan Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017, yang terdiri dari:
  - 1) Aset yang akan dihibahkan ke Kabupaten/Kota sebesar Rp124.001.084.453,00
  - 2) Aset rusak berat sebesar Rp454.941.500,00.
3. Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2018 sebesar (Rp2.400.000.000,00) sama dengan Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2017.

#### 5.2.2 Kewajiban

31 Desember 2018

31 Desember 2017

**Rp122.382.525,00**

**Rp6.268.918.765,00**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi, terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018 sebesar Rp122.382.525,00 turun sebesar Rp6.146.536.240,00 atau 98,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.268.918.765,00. Seluruh kewajiban tersebut merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

### 5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

**31 Desember 2018**

**Rp122.382.525,00**

**31 Desember 2017**

**Rp6.268.918.765,00**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp122.382.525,00 turun sebesar Rp6.146.536.240,00 atau 98,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp6.268.918.765,00. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-18	31-Des-17	Naik (Turun)	%
1	Utang Belanja Jasa Kantor	59.772.525,00	62.138.765,00	(2.366.240,00)	3,81
2	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	62.610.000,00	6.206.780.000,00	(6.144.170.000,00)	98,99
	Jumlah	122.382.525,00	6.268.918.765,00	(6.146.536.240,00)	98,05

### 5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

**31 Desember 2018**

**Rp0,00**

**31 Desember 2017**

**Rp0,00**

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

### 5.2.3 Ekuitas

**31 Desember 2018**

**Rp858.806.148.042,62**

**31 Desember 2017**

**Rp418.819.052.209,53**

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp Rp858.806.148.042,62 naik sebesar Rp439.987.095.833,09 atau 105,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp418.819.052.209,53. Saldo tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Dinas Pendidikan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018, yaitu selisih antara total nilai Aset dikurangi dengan total nilai Kewajiban.



### 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus (Defisit) Operasional, Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos LO Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut.

**Tabel 5.27 Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Pendapatan - LO	15.400.000,00	273.051.350,00	(257.651.350,00)	(94,36)
2	Beban	890.157.625.403,37	772.296.262.361,73	117.861.363.041,64	15,26
3	Surplus (Defisit) Operasional	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)	(118.119.014.391,64)	15,30
4	Surplus (Defisit) Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)	(118.119.014.391,64)	15,30
6	Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Surplus (Defisit) LO</b>	<b>(890.142.225.403,37)</b>	<b>(772.023.211.011,73)</b>	<b>(118.119.014.391,64)</b>	<b>15,30</b>

#### 5.3.1 Pendapatan-LO

**Tahun 2018**

**Rp15.400.000,00**

**Tahun 2017**

**Rp273.051.350,00**

Jumlah Pendapatan-LO Tahun 2018 sebesar Rp15.400.000,00 turun sebesar Rp257.651.350,00 atau 94,36% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp273.051.350,00. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, dengan ringkasan sebagai berikut:

**Tabel 5.28 Ringkasan Pendapatan-LO Tahun 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	15.400.000,00	10.800.000,00	4.600.000,00	42,59
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	262.251.350,00	(262.251.350,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>273.051.350,00</b>	<b>(257.651.350,00)</b>	<b>(94,36)</b>

##### 5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

**Tahun 2018**

**Rp15.400.000,00**

**Tahun 2017**

**Rp10.800.000,00**

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018 sebesar Rp15.400.000,00 naik sebesar Rp4.600.000,00 atau 42,59% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp10.800.000,00. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 5.29 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	15.400.000,00	10.800.000,00	4.600.000,00	42,59
3	Pendapatan HPKD yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>42,59</b>

#### 5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

**Tahun 2018**

**Rp0,00**

**Tahun 2017**

**Rp0,00**

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

#### 5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

**Tahun 2018**

**Rp2.010.231.320,00**

**Tahun 2017**

**Rp2.171.957.491,00**

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2018 sebesar Rp15.400.000,00 naik sebesar Rp4.600.000,00 atau 42,59% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp10.800.000,00 dengan rincian pada Tabel berikut.

**Tabel 5.30 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Retribusi	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga(lapangan tenis)	15.400.000,00	10.800.000,00	4.600.000,00	42,59
	<b>Jumlah</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>42,59</b>

#### 5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

**Tahun 2018**

**Rp0,00**

**Tahun 2017**

**Rp0,00**

Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKD)-LO Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

#### 5.3.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2018	Tahun 2017
Rp0,00	Rp0,00
Lain-Lain PAD yang Sah - LO pada Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil.	

#### 5.3.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2018	Tahun 2017
Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer-LO Tahun 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil.	

#### 5.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Tahun 2018	Tahun 2017
Rp0,00	Rp262.251.350,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2018 adalah sebesar Rp0,00 atau turun sebesar (Rp262.251.350,00) atau 100% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp262.251.350,00.	

#### 5.3.2 Beban

Tahun 2018	Tahun 2017
Rp890.157.625.403,37	Rp772.296.262.361,73

Jumlah beban kegiatan operasional Tahun 2018 sebesar Rp890.157.625.403,37 naik sebesar 117.861.363.041,64 atau 15,26% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp772.296.262.361,73, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.31 Rincian Beban Operasional Tahun 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Beban Pegawai - LO	582.688.970.194,14	503.306.517.731,00	79.382.452.463,14	15,77
2	Beban Barang dan Jasa	305.070.433.650,00	257.001.535.137,00	48.068.898.513,00	18,70
3	Beban Hibah	0,00	767.624.082,00	(767.624.082,00)	(100,00)
4	Beban Penyusutan & Amortisasi	2.398.221.559,23	11.220.585.411,73	(8.822.363.852,50)	(78,63)
	Jumlah	890.157.625.403,37	772.296.262.361,73	117.861.363.041,64	15,26

Beban kegiatan operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun, baik yang berupa kas/tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban sebesar belanja yang dibayarkan pada Tahun 2018, tidak termasuk pembayaran atas belanja tahun sebelumnya, dan ditambah dengan utang belanja Tahun 2017.

### 5.3.3 Surplus (Defisit) Operasional

Tahun 2018			Tahun 2017		
Rp(890.142.225.403,37)			Rp(772.023.211.011,73)		
Surplus	(Defisit)	Operasional	Tahun	2018	sebesar
Rp890.142.225.403,37 naik sebesar Rp118.119.014.391,64 atau 15,30% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp772.023.211.011,73. Jumlah Surplus (Defisit) kegiatan operasional merupakan selisih dari Pendapatan-LO sebesar Rp15.400.000,00 dengan Beban-LO sebesar Rp890.157.625.403,37.					

### 5.3.4 Surplus (Defisit) Non Operasional

Tahun 2018	Tahun 2017
Rp0,00	Rp0,00
Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.	

### 5.3.5 Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Tahun 2018			Tahun 2017		
Rp(890.142.225.403,37)			Rp(772.023.211.011,73)		
Surplus	(Defisit)	Operasional	Tahun	2018	sebesar
Rp890.142.225.403,37 naik sebesar Rp118.119.014.391,64 atau 15,30% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp772.023.211.011,73. Jumlah Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa merupakan hasil dari penjumlahan Surplus (defisit) Kegiatan Operasional sebesar Rp890.142.225.403,37 dan Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00					

### 5.3.6 Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa

Tahun 2018	Tahun 2017
Rp0,00	Rp0,00

Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil. Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa merupakan Pendapatan Luar Biasa dikurangi Beban Luar Biasa. Pendapatan Luar Biasa Tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau nihil dan Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00.

### 5.3.7 Surplus (Defisit)-LO

Tahun 2018	Tahun 2017
<b>Rp(890.142.225.403,37)</b>	<b>Rp(772.023.211.011,73)</b>

Surplus (Defisit) - LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah memperhitungkan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa. Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2018 Rp890.142.225.403,37 naik sebesar Rp118.119.014.391,64 atau 15,30% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp772.023.211.011,73. Adapun perhitungan Surplus (Defisit)-LO sebagai berikut.

**Tabel 5.32 Perhitungan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Pendapatan - LO	15.400.000,00	273.051.350,00	(257.651.350,00)	(94,36)
2	Beban	890.157.625.403,37	772.296.262.361,73	117.861.363.041,64	15,26
3	Surplus (Defisit) Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)	(118.119.014.391,64)	15,30
5	<b>Surplus (Defisit) LO</b>	<b>(890.142.225.403,37)</b>	<b>(772.023.211.011,73)</b>	<b>(118.119.014.391,64)</b>	<b>15,30</b>

#### 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan nilai Ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan informasi tentang Ekuitas Awal; Surplus (Defisit) Laporan Operasional (LO) pada periode berkenaan; Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar; Kewajiban Untuk Dikonsolidasi serta Ekuitas Akhir. Ringkasan dan penjelasan atas LPE Tahun 2018 dan 2017 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.33 Ringkasan LPE Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Ekuitas Awal	418.819.052.209,53	0,00	418.819.052.209,53	100,00
2	Surplus/Defisit – LO	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)	(118.119.014.391,64)	15,30
3	Dampak Kumulatif PKA / Kesalahan Mendasar	362.388.612.200,32	0,00	362.388.612.200,32	100,00
4	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	967.740.709.036,14	0,00	967.740.709.036,14	100,00
	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>858.806.148.042,62</b>	<b>(772.023.211.011,73)</b>	<b>1.630.829.359.054,35</b>	<b>211,24</b>

##### 5.4.1 Ekuitas Awal

###### Tahun 2018

**Rp418.819.052.209,53**

###### Tahun 2017

**Rp0,00**

Nilai Ekuitas Awal Tahun 2018 sebesar Rp418.819.052.209,53 merupakan nilai Ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018. Nilai Ekuitas Awal tersebut bertambah sebesar Rp418.819.052.209,53 atau sebesar 100% dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal Tahun 2017 sebesar Rp0,00.

##### 5.4.2 Surplus (Defisit)-LO

###### Tahun 2018

**Rp(890.142.225.403,37)**

###### Tahun 2017

**Rp(772.023.211.011,73)**

Surplus (Defisit)-LO Tahun 2018 sebesar Rp890.142.225.403,37 naik sebesar Rp118.119.014.391,64 atau 15,30% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp772.023.211.011,73. Jumlah Surplus (Defisit) - LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode setelah memperhitungkan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional yang menambah nilai Ekuitas.

##### 5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

###### Tahun 2018

**Rp362.388.612.200,32**

###### Tahun 2017

**Rp0,00**

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2018 sebesar Rp362.388.612.200,32, naik sebesar Rp362.388.612.200,32 atau 100% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp0,00.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekuitas (menambah dan/atau mengurangi nilai ekuitas) yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi/penyesuaian yang diperkenankan atas kesalahan-kesalahan mendasar. Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2018 sebesar Rp362.388.612.200,32, seluruhnya merupakan koreksi/penyesuaian atas kesalahan pembukuan/pencatatan tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.34 Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2018**  
(Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar)

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	418.819.052.209,53	0,00
2	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	5.6.2	(890.142.225.403,37)	(772.023.211.011,73)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	362.388.612.200,32	0,00
4	Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap		537.362.813.371,51	0,00
5	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(181.118.371.171,19)	0,00
6	Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban		6.144.170.000,00	0,00
7	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASI		967.740.709.036,14	0,00
8	EKUITAS AKHIR	5.6.4	858.806.148.042,62	(772.023.211.011,73)

#### 5.4.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

**Tahun 2018**

**Rp967.740.709.036,14**

**Tahun 2017**

**Rp0,00**

Nilai Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2018 sebesar Rp967.740.709.036,14 sedangkan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Tahun 2017 sebesar Rp0,00 atau nihil.

#### 5.4.5 Ekuitas Akhir

**Tahun 2018**

**Rp858.806.148.042,62**

**Tahun 2017**

**Rp(772.023.211.011,73)**

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp858.806.148.042,62 naik sebesar Rp1.630.829.359.054,35 atau 211,24% dibandingkan Ekuitas Akhir Tahun 2017 sebesar Rp(772.023.211.011,73)

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp858.806.148.042,62 merupakan nilai kekayaan bersih Dinas Pendidikan Provinsi Jambi per 31 Desember 2018, yang berasal dari Ekuitas Awal sebesar Rp418.819.052.209,53, ditambah Surplus (Defisit)-LO sebesar Rp(890.142.225.403,37) ditambah penyesuaian nilai Ekuitas atas kesalahan pembukuan/pencatatan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp362.388.612.200,32 serta kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. Rp967.740.709.036,14. Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2018 sebesar Rp858.806.148.042,62 merupakan nilai Ekuitas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2018 (*lihat penjelasan pos Neraca Nomor 5.3.3*).



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 DOMISILI**

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Telp. (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P&KJbi@hotmail.com, Dinas Pendidikan terdiri dari beberapa bidang dan UPT yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Pembinaan PK-PLK
3. Bidang PP SMA
4. Bidang PP SMK
5. Bidang Pembinaan GTK
6. UPT. BTIKP

#### **6.2 PROGRAM KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

Dinas Pendidikan merupakan instansi teknis yang berperan di bidang pendidikan, dalam pelaksanaan operasionalnya tugas pokok mengacu pada pedoman atau petunjuk yang diterbitkan oleh daerah dan pusat. Kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengacu pada Pelaksanaan Pembagunan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pemerataan pembangunan Pendidikan di Provinsi Jambi antara lain :

##### **I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6 Penyediaan alat tulis kantor
- 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10 Penyediaan makanan dan minuman
- 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

##### **II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2 Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3 Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan gedung kantor
- 4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

##### **III Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

##### **IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1 Kegiatan Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
- V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
  - 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
- VI Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**
  - 1 Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana PKLK
  - 2 Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional
  - 3 Penyelenggaraan PKLK
  - 4 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan PTK
  - 5 Kegiatan Penyelenggaraan PLA
- VII Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**
  - 1 Kegiatan Pelatihan Tenaga Kependidikan dan Laboran Sekolah
  - 2 Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
  - 3 Profesi Pendidik
  - 4 Kegiatan Pelatihan Kepala Sekolah dan Pengawasan Sekolah
  - 5 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru
  - 6 Kegiatan Pembinaan MGMP
- VIII Program Pembinaan SMA**
  - 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA
  - 2 Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama
  - 3 Pembinaan Olimpiade Sain Nasional
  - 4 Kegiatan Pembinaan Debat Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan LCC 4 Pilar (SMA)
  - 5 Bimtek Pengolahan Dana BOS dan APBN (SMA)
  - 6 Kegiatan Rakor Manajemen SMA
  - 7 Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA
  - 8 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
  - 9 Kegiatan Pembinaan Peserta O2SN dan FLS2N
  - 10 Kegiatan BOS APBN
- IX Program Pembinaan SMK**
  - 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan SMK
  - 2 Kegiatan Penyelenggaraan Sekolah Berasrama
  - 3 Kegiatan Pembangunan/Turaf, Pagar SMK
  - 4 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
  - 5 Kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan/Re-Engineering
  - 6 Kegiatan Kompetensi Siswa SMK
  - 7 Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional
  - 8 Pembinaan Sekolah Rujukan/Kerjasama (SMK)
  - 9 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK
  - 10 Kegiatan Pengadaan Meubiler SMK
  - 11 Pengembangan Kurikulum K13
- X Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**
  - 1 Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan
  - 2 Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
  - 3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
  - 4 Kegiatan Koordinasi dan Perencanaan Kab./Kota
  - 5 Kegiatan Pembinaan Pramuka
  - 6 Kegiatan Pembinaan UKS

- 7 Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren
- 8 Kegiatan Pembinaan Minat Baca
- 9 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi TIK Pendidikan
- 10 Kegiatan Pengelolaan Jejaring dan Publikasi Pendidikan
- 11 Kegiatan Produksi TIK Pendidikan
- 12 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK Pendidikan
- 13 Kegiatan PPDB Online

**XI Program Beasiswa dan Bosda**

- 1 Beasiswa
- 2 Pembayaran PTK NON PNS SMA/SMK

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (PA) dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018;

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.600.000,00 dengan Realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 15.400.000,00 atau sebesar 122.22%. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 1.030.562.205.653,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 985.434.830.388,14 atau sebesar 95.62%. dengan Realisasi fisik 100% sehingga capaian kinerja keuangan dinyatakan efisien.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Jambi, April 2019  
Pengguna Anggaran

H. Agus Herianto, S.H.  
NIP 196908181997031004

### Lampiran 4.1

### Lampiran XI Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015

### Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi

**TABEL MASA MANFAAT DALAM RANGKA PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	5
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu (Khusus Rambu Tidak Bersuar)	5
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

**Lampiran 5.1**  
**Rekap STS Pengembalian Belanja/Gaji**

NO	NOMOR STS	URAIAN	NOMINAL	KET
1	0002/STS-GAJI/II/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan tunjangan bulan juni s/d September TH 2017 a.n. Nung Ardani, S.Pd	15.003.781,86	gaji
2	0003/STS-GAJI/II/2018	Keterlanjuran Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Oktober 2017 s/d Januari 2018 a.n Walyana	22.069.600,00	gaji
3	0004/STS-GAJI/II/2018	Keterlanjuran Pembayaran gaji dan tunjangan bulan November 2017 a.n Risbay	5.732.400,00	gaji
4	0005/STS-GAJI/III/2018	Keterlanjuran Pembayaran gaji dan tunjangan bulan September s/d Desember 2017 a.n Tariah, S.P.d	18.404.800,00	gaji
5	0006/STS-GAJI/III/2018	Keterlanjuran Pembayaran gaji dan tunjangan bulan Desember 2017 a.n Kuswandi	4.970.000,00	gaji
6	0007/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Tunjangan Fungsional a.n Syarfandi S.Ag, M.Pd Bulan Januari s.d Februari 2018	1.280.000,00	gaji
7	0008/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji a.n Zulfahmi Lubis, S.Pd Bulan Februari 2018	5.554.500,00	gaji
8	0009/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Tunjangan Anak dan beras dari bulan oktober 2016 s.d januari 2018	2.682.560,00	gaji
9	0010/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran pembayaran Tunjangan beras An.Henlenti dan Sry Dorayance	144.840,00	gaji
10	0011/STS/DISDIK/2018	Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan A.N Maruly bulan Oktober 2017	5.410.000,00	gaji
11	0012/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.n Sidvia Shinta, Ismiaati Purwani, Boyani dan Evita Maria Sari	15.840.900,00	gaji
12	0013/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan desember 2017 An Drs. H. Siburian	5.405.400,00	gaji
13	0014/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Anak An. Ibrahim Jalal NIP. 19611223 198203 1 005	17.277.700,00	gaji
14	0015/STS/DISDIK/2018	Pembayaran TPP Bulan Januari 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	67.954.663,00	tpp
15	0016/STS/DISDIK/2018	Pembayaran TPP Bulan Februari 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	37.996.979,00	tpp
16	0017/STS/DISDIK/2018	Pembayaran TPP Bulan Maret 2018 Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	40.246.374,00	tpp
17	0018/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan An. Erni Mariaty (SMAN 13 Kerinci)	14.608.000,00	gaji
18	0019/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Februari dan Maret An. Kartini, S.Kom (SMAN 1 Sarolangun)	5.638.000,00	
19	0020/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan September s/d Desember 2017 An. Nipon Andra, S.Pd	15.632.000,00	gaji
20	0021/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Februari 2018 An. Drs. Boyani	4.707.000,00	gaji
21	0022/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Juli 2018 An. Siti Rabyah, S.Pd Nip. 19760112 2 008	3.055.300,00	gaji
22	0023/STS/DISDIK/2018	Pembayaran TPP Bulan Januari 2018 An. Dra. Nirma Erika dan Drs. Teguh	3.135.000,00	tpp
23	0024/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Tunjangan anak dan Beras dari Bulan Agustus 2015 s/d Juli 2018	9.176.544,00	gaji
24	0025/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji April s/d Juni 2018 dan Gaji ke 13 dan 14 Tahun 2018	31.058.200,00	gaji
25	0026/STS/DISDIK/2018	Keterlanjutan Pembayaran Anak dan Tunjangan Beras Bulan Agustus 2017 s/d Agustus 2018 An. Sudarsi	2.231.944,00	gaji
26	0027/STS/DISDIK/2018	Keterlanjutan Pembayaran Tunjangan Anak dan Beras dari Bulan Juli s/d Agustus 2018 An. Khairil Amri	329.504,00	gaji

NO	NOMOR STS	URAIAN	NOMINAL	KET
27	0028/STS/DISDIK/2018	Kelebihan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai An. Ismail, SH Nip.19650109 200801 1 001 Bulan September 2018	185.000,00	tpp
28	0029/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji ( Gaji ke 14/THR) An. Erni Mariaty, SE Nip. 19850508 201001 2 030	3.137.200,00	gaji
29	0030/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan April s/d Mei 2018 An. Drs. Zikwan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	11.193.600,00	gaji
30	0031/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Januari 2017 s/d September 2018 An. Somad	3.147.060,00	gaji
31	0032/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan (THR) An. Drs. Zikwan	5.988.000,00	gaji
32	0033/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Tunjangan Anak dan Beras An. Tusrial (Pengawas Sarolangun)	1.844.260,00	gaji
33	0034/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan An. Sudirman Dari Bulan Juli s/d Oktober 2018	23.562.000,00	gaji
34	0035/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Tunjangan Anak dan Beras dari Bulan November 2016 s/d Agustus 2018 An. Zaidar	3.332.384,00	gaji
35	0036/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan November s/d Desember 2017 An. Nasril, S.Pd	8.962.200,00	gaji
36	0037/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Agustus s/d September 2018 A.n M. Yusuf dan Keterlanjuran Pembayaran Gaji Terusan Ke II A.n Tarmizan 2018	15.934.300,00	gaji
37	0038/STS/DISDIK/2018	Setoran Tunjangan Penghasilan Guru PNSD Bulan Januari An. Winarti Nip.19841006 200902 2 007	237.500,00	tamsil
38	0039/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan September 2018 An. Tarmizan	4.379.500,00	gaji
39	0040/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan September An. Hozali	5.155.500,00	gaji
40	0041/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji Bulan Desember An. Muslim	4.984.600,00	gaji
41	0042/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji Bulan November An. Thomas Tufen	5.260.800,00	gaji
42	0043/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan September s/d Oktober 2018 An. Mohd. Arfan	10.812.000,00	gaji
43	0044/STS/DISDIK/2018	Keterlanjuran Pembayaran Gaji An. Mardan Sirorus Pane Bulan Maret s/d Oktober	42.086.400,00	gaji
44	0045/STS/DISDIK/2018	Kelebihan Pembayaran TPP Bulan Desember 2018	14.474.579,00	tpp
		<b>JUMLAH</b>	<b>520.222.872,86</b>	



**Lampiran 5.2**  
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018

No	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
1	Pengadaan Alat Kantor Lainnya		280.000.000,00
2	Pengadaan Alat Kantor Lainnya		440.000.000,00
3	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	DINAS PENDIDIKAN	78.373.000,00
4	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	PUSAT SUMBER BELAJAR	175.547.300,00
5	Pengadaan Meubelair	SMKN SPP JAMBI	199.056.000,00
6	Pengadaan Meubelair	SMKN SPP JAMBI	147.985.000,00
7	Pengadaan Meubelair	SMKN 3 KOTA JAMBI	147.985.000,00
8	Pengadaan Meubelair	SMKN 6 KOTA JAMBI	98.290.000,00
9	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 KOTA JAMBI	98.290.000,00
10	Pengadaan Meubelair	SMKN 2 KOTA JAMBI	98.290.000,00
11	Pengadaan Meubelair	SMKN SPP 3 KERINCI	99.613.800,00
12	Pengadaan Meubelair	SMKN 5 KOTA JAMBI	98.290.000,00
13	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	99.480.000,00
14	Pengadaan Meubelair	SMKN 2 MUARA BUNGO	49.145.800,00
15	Pengadaan Meubelair	SMKN 13 MERANGIN	99.480.000,00
16	Pengadaan Meubelair	SMKN 8 TEBO	99.480.000,00
17	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 BATHIN III ULU	99.480.000,00
18	Pengadaan Meubelair	SMKN 3 TUNGKAL ULU	99.480.000,00
19	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 MUARA BUNGO	49.145.800,00
20	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 PELEPAT ILIR	49.145.800,00
21	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 PENGABUAN	49.145.800,00
22	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 MUKO-MUKO BATHIN VII	99.480.000,00
23	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	49.145.800,00
24	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 KERINCI	49.806.900,00
25	Pengadaan Meubelair	SMKN 4 SUNGAI PENUH	49.806.900,00
26	Pengadaan Meubelair	SMKN 6 KERINCI	49.806.900,00
27	Pengadaan Meubelair	SMAN 1 KOTA JAMBI	197.760.000,00
28	Pengadaan Meubelair	SMAN 3 KOTA JAMBI	197.760.000,00
29	Pengadaan Meubelair	SMAN 11 KOTA JAMBI	197.760.000,00
30	Pengadaan Meubelair	SMAN 10 KOTA JAMBI	197.760.000,00
31	Pengadaan Meubelair	SMAN 4 KOTA JAMBI	98.820.000,00
32	Pengadaan Meubelair	SMAN 5 KERINCI	99.744.000,00
33	Pengadaan Meubelair	SMAN 9 KOTA JAMBI	98.820.000,00
34	Pengadaan Meubelair	SMAN 8 KERINCI	99.744.000,00
35	Pengadaan Meubelair	SMAN 2 BATANGHARI	99.396.000,00
36	Pengadaan Meubelair	SMAN 1 MERANGIN	99.612.000,00
37	Pengadaan Meubelair	SMAN 1 BATANGHARI	99.396.000,00
38	Pengadaan Meubelair	SMAN 11 SAROLANGUN	49.806.000,00
39	Pengadaan Meubelair	SMAN 12 KERINCI	99.900.000,00
40	Pengadaan Meubelair	SMAN 1 SAROLANGUN	99.612.000,00
41	Pengadaan Meubelair	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	99.724.000,00
42	Pengadaan Meubelair	SMAN 11 KERINCI	99.900.000,00
43	Pengadaan Meubelair	SMAN 2 SUNGAI PENUH	49.878.000,00

No	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
44	Pengadaan Meubelair	SMAN 18 TEBO	49.410.000,00
45	Pengadaan Meubelair	SMAN 2 KERINCI	49.950.000,00
46	Pengadaan Meubelair	SMAN 3 MERANGIN	99.684.000,00
47	Pengadaan Meubelair	SMAN 1 TANAH TUMBUH	49.867.000,00
48	Pengadaan Meubelair	SMAN 1 PELEPAT ILIR	49.867.000,00
49	Pengadaan Meubelair	SMAN 7 TEBO	49.842.000,00
50	Pengadaan Meubelair	SMAN 8 SAROLANGUN	149.418.000,00
51	Pengadaan Meubelair	SMAN 11 KOTA JAMBI	99.384.000,00
52	Pengadaan Meubelair	SMAN 7 TEBO	49.842.000,00
53	Pengadaan Meubelair	SMAN 1 KERINCI	99.900.000,00
54	Pengadaan Meubelair	SMAN 6 SAROLANGUN	49.842.000,00
55	Pengadaan Meubelair	SMAN 2 MUARO JAMBI	99.384.000,00
56	Pengadaan Meubelair	SMAN 7 KERINCI	149.526.000,00
57	Pengadaan Meubelair	SMAN 9 KERINCI	149.526.000,00
58	Pengadaan Meubelair	SMAN 10 KERINCI	99.684.000,00
59	Pengadaan Meubelair	SMAN 2 SAROLANGUN	148.896.000,00
60	Pengadaan Meubelair	SMAN 19 TEBO	99.468.000,00
61	Pengadaan Meubelair	SMAN 2 TEBO	99.468.000,00
62	Pengadaan Meubelair	SMAN 17 MERANGIN	99.612.000,00
63	Pengadaan Meubelair	SMKN 11 SAROLANGUN	198.960.000,00
64	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 PENGABUAN	99.480.000,00
65	Pengadaan Meubelair	SMKN 3 KOTA JAMBI	198.420.000,00
66	Pengadaan Meubelair	SMKN SPP JAMBI	98.657.000,00
67	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 MUARA BUNGO	49.145.800,00
68	Pengadaan Meubelair	SMKN 1 KERINCI	49.806.900,00
69	Pengadaan Meubelair	SMKN 2 MERANGIN	99.337.000,00
70	Pengadaan Meubelair		125.601.000,00
71	Pengadaan Meubelair	SMAN 2 KOTA JAMBI	49.440.000,00
72	Pengadaan Meubelair	SMAN 7 BATANGHARI	49.590.000,00
73	Pengadaan Meubelair	SMAN 2 MERANGIN	99.548.000,00
74	Pengadaan Meubelair	SMAN 12 KERINCI	49.950.000,00
75	Pengadaan Meubelair	SMAN 5 KOTA JAMBI	49.440.000,00
76	Pengadaan Alat Pendingin	DINAS PENDIDIKAN	45.000.000,00
77	Pengadaan Alat Pendingin	DINAS PENDIDIKAN	17.500.000,00
78	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		161.356.000,00
79	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	DINAS PENDIDIKAN	2.960.000,00
80	Pengadaan Komputer Unit Jaringan		1.787.100.000,00
81	Pengadaan Personal Komputer		89.925.000,00
82	Pengadaan Personal Komputer		42.000.000,00
83	Pengadaan Personal Komputer		36.500.000,00
84	Pengadaan Personal Komputer		59.000.000,00
85	Pengadaan Peralatan Mini Komputer		4.884.000,00
86	Pengadaan Peralatan Mini Komputer		99.800.000,00
87	Pengadaan Peralatan Mini Komputer		10.507.300,00

No	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
88	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	DINAS PENDIDIKAN	34.500.000,00
89	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	DINAS PENDIDIKAN	37.000.000,00
90	Pengadaan Peralatan Personal Komputer		59.750.000,00
91	Pengadaan Peralatan Personal Komputer		51.439.000,00
92	Pengadaan Peralatan Personal Komputer		40.500.000,00
93	Pengadaan Peralatan Personal Komputer		17.360.600,00
94	Pengadaan Meja Kerja Pejabat		93.775.000,00
95	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat		24.475.000,00
96	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 2 KERINCI	200.000.000,00
97	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 3 SUNGAI PENUH	200.000.000,00
98	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 KOTA JAMBI	200.000.000,00
99	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 12 MERANGIN	200.000.000,00
100	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 2 SAROLANGUN	200.000.000,00
101	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 2 BATANGHARI	200.000.000,00
102	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 KUALA TUNGKAL	200.000.000,00
103	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 5 TEBO	200.000.000,00
104	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 MUARA BUNGO	200.000.000,00
105	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN TITIAN TERAS	200.000.000,00
106	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN SPP MERANGIN	159.124.552,00
107	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 SAROLANGUN	3.340.154,00
108	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	16.583.546,00
109	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 MERANGIN	27.545.124,00
110	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 3 SUNGAI PENUH	189.368.471,00
111	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKS TARUNA INDONESIA	7.153.628,00
112	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 2 MUARA BUNGO	159.078.636,00
113	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN SPP 3 KERINCI	18.914.716,00
114	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	31.160.806,00
115	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 4 KOTA JAMBI	31.363.672,00
116	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 TANJABTIM	7.157.524,00
117	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 SAROLANGUN	96.471.487,00
118	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN SPP JAMBI	239.264.476,00
119	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 4 KOTA JAMBI	16.593.088,00

No	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
120	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN SPP JAMBI	957.057.905,00
121	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 3 SUNGAI PENUH	757.473.885,00
122	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 4 KOTA JAMBI	66.372.351,00
123	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 TANJABTIM	28.630.098,00
124	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 SAROLANGUN	13.360.618,00
125	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 SAROLANGUN	385.885.948,00
126	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 4 KOTA JAMBI	125.454.686,00
127	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	124.643.222,00
128	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN SPP MERANGIN	636.498.207,00
129	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 2 MUARA BUNGO	636.314.543,00
130	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 MERANGIN	110.180.498,00
131	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKS TARUNA INDONESIA	28.614.514,00
132	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	66.334.183,00
133	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN SPP 3 KERINCI	75.658.863,00
134	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 3 BATANGHARI	109.992.000,00
135	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 15 TEBO	110.142.000,00
136	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 7 MUARO JAMBI	109.983.000,00
137	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 16 MERANGIN	110.163.000,00
138	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 5 MERANGIN	110.163.000,00
139	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 3 SAROLANGUN	110.125.000,00
140	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 3 TUNGKAL ULU	110.093.000,00
141	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 RANTAU PANDAN	110.194.000,00
142	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 10 KERINCI	110.294.000,00
143	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 4 SAROLANGUN	110.124.000,00
144	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 6 TANJABTIM	110.024.000,00
145	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 10 BATANGHARI	109.994.000,00
146	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 BETARA	110.094.000,00
147	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 11 MUARO JAMBI	109.970.000,00
148	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 2 TANAH SEPENGGAL	110.193.000,00
149	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 4 MERANGIN	110.162.000,00
150	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 7 TANJABTIM	110.023.000,00

No	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
151	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 LIMBUR LUBUK MENGKUANG	110.192.000,00
152	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 14 TEBO	110.143.000,00
153	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 8 BATANGHARI	109.992.000,00
154	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 PENGABUAN	110.092.000,00
155	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 10 MUARO JAMBI	109.984.000,00
156	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 5 BATANGHARI	109.993.000,00
157	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 8 MUARO JAMBI	109.964.000,00
158	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 5 SAROLANGUN	110.126.000,00
159	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 4 TEBO	110.144.000,00
160	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 2 TANJABTIM	110.023.000,00
161	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 2 TUNGKAL ULU	110.091.000,00
162	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 13 KERINCI	110.293.000,00
163	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 MERLUNG	110.093.000,00
164	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 4 TANJABTIM	110.022.000,00
165	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 13 MERANGIN	110.164.000,00
166	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 TEBO	110.144.000,00
167	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 6 SAROLANGUN	110.124.000,00
168	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 KOTA JAMBI	623.007.257,00
169	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 MUARA BUNGO	641.533.955,00
170	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 KOTA JAMBI	122.339.000,00
171	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 MUARA BUNGO	122.339.000,00
172	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 2 KOTA JAMBI	273.814.400,00
173	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 3 KOTA JAMBI	553.280.000,00
174	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMKN 1 MUKO-MUKO BATHIN VII	799.790.000,00
175	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 6 KOTA JAMBI	198.880.000,00
176	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAS XAVERIUS I	194.109.500,00
177	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMA TRI SUKSES BOARDING SCHOOL	199.990.891,00
178	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain		199.668.000,00
179	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 7 SAROLANGUN	199.990.891,00
180	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain		199.800.000,00
181	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 1 BATANGHARI	199.990.891,00

No	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
182	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAS PERTIWI 1 KOTA JAMBI	199.990.891,00
183	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMA S. SURYA IBU	199.990.891,00
184	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	SMAN 9 KOTA JAMBI	199.990.891,00
185	Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain		163.657.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>26.665.499.259,00</b>

**Lampiran 5.3**  
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
1	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 6 KOTA JAMBI	29.953.000,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	179.720.500,00
3	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP JAMBI	189.810.000,00
4	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP JAMBI	9.990.000,00
5	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 8 TEBO	11.980.000,00
6	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	9.930.000,00
7	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	4.470.000,00
8	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	9.980.000,00
9	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 BETARA	19.970.000,00
10	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	59.934.000,00
11	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	57.885.000,00
12	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 8 TEBO	59.976.000,00
13	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	59.904.000,00
14	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 BETARA	59.970.000,00
15	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH TUMBUH	12.450.000,00
16	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	12.450.000,00
17	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 19 TEBO	15.950.000,00
18	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 15 TEBO	1.980.000,00
19	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 KERINCI	8.950.000,00
20	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 16 TEBO	12.450.000,00
21	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 8 TEBO	12.450.000,00
22	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 KERINCI	8.950.000,00
23	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 SAROLANGUN	12.450.000,00
24	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 SAROLANGUN	24.900.000,00
25	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	8.950.000,00
26	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MERANGIN	24.900.000,00
27	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 18 TEBO	13.440.000,00
28	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TEBO	12.450.000,00
29	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 TEBO	12.450.000,00
30	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 PELEPAT ILIR	12.450.000,00
31	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	84.930.000,00
32	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MUARA BUNGO	46.870.588,00
33	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 SUNGAI PENUH	46.870.588,00
34	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TANJABTIM	153.403.280,00
35	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	93.741.177,00
36	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TEBO	93.741.177,00
37	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 MERANGIN	93.741.177,00
38	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 KOTA JAMBI	93.741.177,00
39	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 TEBO	153.403.280,00
40	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	153.403.280,00
41	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 PENGABUAN	230.104.920,00
42	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 TANJABTIM	153.403.280,00
43	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 MUARO JAMBI	153.403.280,00
44	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MUARO JAMBI	153.403.280,00
45	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 TEBO	153.403.280,00
46	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 MERANGIN	153.403.280,00
47	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 14 MUARO JAMBI	153.403.280,00
48	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 MERANGIN	153.403.280,00
49	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MERANGIN	153.403.280,00
50	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TEBO	230.104.920,00
51	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MERLUNG	230.104.920,00
52	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 TEBO	153.403.280,00
53	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 MERANGIN	153.403.280,00
54	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 11 MUARO JAMBI	153.403.280,00
55	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 BATANGHARI	153.403.280,00

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
56	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 KERINCI	123.072.000,00
57	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	123.072.000,00
58	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 SAROLANGUN	153.403.280,00
59	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 SAROLANGUN	153.403.280,00
60	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 KERINCI	123.072.000,00
61	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 15 TEBO	153.403.280,00
62	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MUARO JAMBI	76.701.640,00
63	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 TUNGKAL ULU	153.403.280,00
64	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 SAROLANGUN	230.104.920,00
65	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	153.403.280,00
66	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MERANGIN	76.701.640,00
67	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 TANAH TUMBUH	123.072.000,00
68	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MUARO JAMBI	123.072.000,00
69	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MERANGIN	123.072.000,00
70	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MERLUNG	123.072.000,00
71	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 15 TEBO	123.072.000,00
72	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 MERANGIN	123.072.000,00
73	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 TEBO	123.072.000,00
74	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TANJABTIM	123.072.000,00
75	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TUNGKAL ULU	123.072.000,00
76	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 LIMBUR LUBUK	123.072.000,00
77	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 MERANGIN	123.072.000,00
78	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TUNGKAL ULU	123.072.000,00
79	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 TEBO	123.072.000,00
80	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	123.072.000,00
81	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TEBO	123.072.000,00
82	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 TANJABTIM	123.072.000,00
83	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 BETARA	123.072.000,00
84	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 KERINCI	123.072.000,00
85	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MERANGIN	123.072.000,00
86	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	140.611.700,00
87	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 BETARA	140.611.700,00
88	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 KOTA JAMBI	230.104.920,00
89	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 KOTA JAMBI	46.870.588,00
90	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 MERANGIN	230.104.920,00
91	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 MERANGIN	123.072.000,00
92	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 TANJABTIM	76.701.640,00
93	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 KERINCI	123.072.000,00
94	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 8 KERINCI	123.072.000,00
95	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	12.874.000,00
96	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	9.875.000,00
97	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 5 KOTA JAMBI	29.722.000,00
98	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	13.843.000,00
99	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	73.300.000,00
100	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 KOTA JAMBI	11.980.000,00
101	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	24.950.000,00
102	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SLB NEGERI MUARA BULIAN	158.452.000,00
103	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SLB NEGERI TANJABTIM	122.400.000,00
104	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 SAROLANGUN	12.450.000,00
105	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 8 TEBO	59.808.000,00
106	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 KOTA JAMBI	49.555.000,00
107	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MUARO JAMBI	59.850.000,00
108	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	35.919.000,00
109	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 KERINCI	35.844.000,00
110	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	59.883.000,00
111	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 KERINCI	35.850.000,00
112	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 BATANGHARI	59.934.000,00
113	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH TUMBUH	59.901.000,00
114	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TEBO	59.901.000,00



NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
115	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 SAROLANGUN	59.921.700,00
116	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 TEBO	59.901.000,00
117	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	418.828.249,00
118	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 PELEPAT ILIR	59.922.600,00
119	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 SAROLANGUN	59.817.000,00
120	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 18 TEBO	59.250.000,00
121	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 5 KOTA JAMBI	128.763.880,00
122	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	124.532.866,00
123	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 PELEPAT ILIR	59.883.000,00
124	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	296.604.000,00
125	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 6 KOTA JAMBI	162.587.720,00
126	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	296.604.000,00
127	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 SAROLANGUN	269.640.000,00
128	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	269.640.000,00
129	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	129.792.000,00
130	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	125.417.500,00
131	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 KOTA JAMBI	269.640.000,00
132	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 4 KOTA JAMBI	269.640.000,00
133	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUKO-MUKO BATHIN VII	276.381.000,00
134	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	269.640.000,00
135	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MERANGIN	276.381.000,00
136	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 BETARA	129.935.000,00
137	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP JAMBI	283.122.000,00
138	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 BATANGHARI	283.122.000,00
139	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 SAROLANGUN	96.295.164,00
140	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 KOTA JAMBI	80.036.000,00
141	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 MUARA BUNGO	276.381.000,00
142	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 MERANGIN	113.348.197,00
143	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP 3 KERINCI	269.640.000,00
144	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUARA BUNGO	276.381.000,00
145	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP MERANGIN	276.381.000,00
146	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP MERANGIN	276.381.000,00
147	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 19 TEBO	73.500.242,00
148	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 KERINCI	92.304.000,00
149	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TUNGKAL ULU	92.304.000,00
150	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 SAROLANGUN	115.052.460,00
151	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TEBO	70.305.883,00
152	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 TANJABTIM	92.304.000,00
153	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	105.458.775,00
154	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 MERANGIN	172.578.690,00
155	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 LUBUK MENGKUANG	92.304.000,00
156	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 TUNGKAL ULU	115.052.460,00
157	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	92.304.000,00
158	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 KOTA JAMBI	70.305.883,00
159	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 TANJABTIM	115.052.460,00
160	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 BETARA	105.458.775,00
161	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 BETARA	92.304.000,00
162	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 TEBO	92.304.000,00
163	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 KERINCI	92.304.000,00
164	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TANJABTIM	115.052.460,00
165	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TEBO	92.304.000,00
166	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TEBO	172.578.690,00
167	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 SAROLANGUN	115.052.460,00
168	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MUARO JAMBI	57.526.230,00
169	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 TEBO	115.052.460,00
170	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 MUARO JAMBI	115.052.460,00
171	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 KERINCI	92.304.000,00
172	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MERANGIN	57.526.230,00
173	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 14 MUARO JAMBI	115.052.460,00

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
174	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 MERANGIN	115.052.460,00
175	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 TEBO	115.052.460,00
176	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MERANGIN	92.304.000,00
177	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TUNGKAL ULU	92.304.000,00
178	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 8 KERINCI	92.304.000,00
179	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 KOTA JAMBI	35.152.941,00
180	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 11 MUARO JAMBI	115.052.460,00
181	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 15 TEBO	115.052.460,00
182	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 MERANGIN	92.304.000,00
183	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 MERANGIN	115.052.460,00
184	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	115.052.460,00
185	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 SAROLANGUN	172.578.660,00
186	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 TEBO	92.304.000,00
187	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 MERANGIN	70.305.883,00
188	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	92.304.000,00
189	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 15 TEBO	92.304.000,00
190	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 MERANGIN	92.304.000,00
191	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	115.052.460,00
192	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 TEBO	115.052.460,00
193	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 KERINCI	92.304.000,00
194	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TANJABTIM	92.304.000,00
195	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	70.305.883,00
196	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 MERANGIN	92.304.000,00
197	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 TANJABTIM	57.526.230,00
198	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 PENGABUAN	172.578.690,00
199	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 TANAH TUMBUH	92.304.000,00
200	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MUARO JAMBI	115.052.460,00
201	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MUARO JAMBI	92.304.000,00
202	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MUARA BUNGO	35.152.941,00
203	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MERLUNG	172.578.690,00
204	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MERLUNG	92.304.000,00
205	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 BATANGHARI	115.052.460,00
206	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 KOTA JAMBI	172.578.690,00
207	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 MERANGIN	115.052.460,00
208	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MERANGIN	92.304.000,00
209	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 16 TEBO	199.610.000,00
210	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 18 TEBO	138.250.000,00
211	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 8 TEBO	129.584.000,00
212	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MUARO JAMBI	129.675.000,00
213	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 BATANGHARI	139.846.000,00
214	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 KERINCI	83.636.000,00
215	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 KERINCI	83.650.000,00
216	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 SUNGAI PENUH	35.152.941,00
217	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MERANGIN	115.052.460,00
218	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SLB NEGERI MUARA BULIAN	118.839.000,00
219	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 SAROLANGUN	139.573.000,00
220	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 SAROLANGUN	139.817.300,00
221	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 PELEPAT ILIR	139.727.000,00
222	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP MERANGIN	207.285.750,00
223	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUKO-MUKO BATHIN VII	207.285.750,00
224	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 MUARA BUNGO	207.285.750,00
225	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 4 KOTA JAMBI	202.230.000,00
226	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 TANJABTIM	222.453.000,00
227	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MERANGIN	207.285.750,00
228	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUARA BUNGO	207.285.750,00
229	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP 3 KERINCI	202.230.000,00
230	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP JAMBI	212.341.500,00
231	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 KOTA JAMBI	202.230.000,00
232	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 SAROLANGUN	202.230.000,00

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
233	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	222.453.000,00
234	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 BATANGHARI	212.341.500,00
235	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SLB NEGERI TANJABTIM	91.800.000,00
236	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	9.984.000,00
237	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	202.230.000,00
238	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	202.230.000,00
239	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	9.647.500,00
240	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP MERANGIN	207.285.750,00
241	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	83.811.000,00
242	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH TUMBUH	139.769.000,00
243	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 PELEPAT ILIR	139.819.400,00
244	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	139.727.000,00
245	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 SAROLANGUN	96.295.164,00
246	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TEBO	139.769.000,00
247	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 TEBO	139.769.000,00
248	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 8 TEBO	9.968.000,00
249	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MUARO JAMBI	9.975.000,00
250	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 TANJABTIM	115.052.460,00
251	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	296.530.400,00
252	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 SAROLANGUN	115.052.460,00
253	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TEBO	172.578.690,00
254	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MUARO JAMBI	115.052.460,00
255	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	115.052.460,00
256	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 BETARA	92.304.000,00
257	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 LIMBUR LUBUK	92.304.000,00
258	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 KERINCI	92.304.000,00
259	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 KERINCI	92.304.000,00
260	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TANJABTIM	115.052.460,00
261	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 SUNGAI PENUH	35.152.942,00
262	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MUARA BUNGO	35.152.942,00
263	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 BATANGHARI	115.052.460,00
264	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 11 MUARO JAMBI	115.052.460,00
265	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MERLUNG	172.578.690,00
266	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 MERANGIN	172.578.690,00
267	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 MUARO JAMBI	115.052.460,00
268	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TEBO	92.304.000,00
269	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	92.304.000,00
270	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 MERANGIN	92.304.000,00
271	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 KOTA JAMBI	172.578.690,00
272	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 TEBO	115.052.460,00
273	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 TEBO	115.052.460,00
274	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 TUNGKAL ULU	115.052.460,00
275	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 8 KERINCI	92.304.000,00
276	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	92.304.000,00
277	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MERANGIN	92.304.000,00
278	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 KERINCI	92.304.000,00
279	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 TANAH TUMBUH	92.304.000,00
280	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 TEBO	92.304.000,00
281	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 KOTA JAMBI	70.305.882,00
282	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MERANGIN	70.305.882,00
283	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TUNGKAL ULU	92.304.000,00
284	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MERANGIN	92.304.000,00
285	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 TEBO	115.052.460,00
286	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 MERANGIN	115.052.460,00
287	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 MERANGIN	92.304.000,00
288	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MERANGIN	57.526.230,00
289	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 SAROLANGUN	115.052.460,00
290	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 MERANGIN	115.052.460,00
291	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 5 KOTA JAMBI	128.763.880,00

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
292	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 BETARA	9.995.000,00
293	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 MERANGIN	70.305.882,00
294	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN N 9 KOTA JAMBI	35.152.942,00
295	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MUARO JAMBI	92.304.000,00
296	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 MERANGIN	115.052.460,00
297	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MERLUNG	92.304.000,00
298	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TUNGKAL ULU	92.304.000,00
299	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 5 KERINCI	92.304.000,00
300	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 MERANGIN	92.304.000,00
301	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TANJABTIM	92.304.000,00
302	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	115.052.460,00
303	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 TANJABTIM	92.304.000,00
304	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 8 TEBO	139.944.000,00
305	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 TEBO	92.304.000,00
306	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 PENGABUAN	172.578.690,00
307	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMA N 15 TEBO	115.052.460,00
308	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 TANJABTIM	57.526.230,00
309	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 14 MUARO JAMBI	115.052.460,00
310	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 15 TEBO	92.304.000,00
311	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 MUARO JAMBI	57.526.230,00
312	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 10 MERANGIN	115.052.460,00
313	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TEBO	70.305.882,00
314	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 SAROLANGUN	172.578.620,00
315	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 BETARA	105.458.775,00
316	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 TANJABTIM	105.458.775,00
317	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MERANGIN	207.285.750,00
318	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP MERANGIN	207.285.750,00
319	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 TUNGKAL ULU	91.968.000,00
320	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 MERLUNG	96.300.000,00
321	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		25.344.000,00
322	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 8 TANJABTIM	88.100.000,00
323	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TUNGKAL ULU	96.450.000,00
324	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 3 TANJABTIM	170.960.000,00
325	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANJABTIM	170.965.000,00
326	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN TITIAN TERAS	99.690.000,00
327	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 SAROLANGUN	202.230.000,00
328	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 BATANGHARI	212.341.500,00
329	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 TANJABTIM	222.453.000,00
330	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP 3 KERINCI	202.230.000,00
331	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 MUARA BUNGO	207.285.750,00
332	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 KOTA JAMBI	196.583.000,00
333	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KERINCI	149.420.000,00
334	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 BUNGO	147.437.000,00
335	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 BETARA	99.480.000,00
336	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP JAMBI	9.990.000,00
337	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 19 TEBO	171.500.566,00
338	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUARA BUNGO	207.285.750,00
339	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP MERANGIN	207.285.750,00
340	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	9.985.000,00
341	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	4.470.000,00
342	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	202.230.000,00
343	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KUALA TUNGKAL	222.453.000,00
344	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUKO-MUKO BATHIN VII	207.285.750,00
345	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	202.230.000,00
346	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 KOTA JAMBI	202.230.000,00
347	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP JAMBI	212.341.500,00
348	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 4 KOTA JAMBI	202.230.000,00
349	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 KERINCI & SMAN 3 KERINCI	12.529.000,00
350	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TEBO & SMAN 5 TEBO	16.852.000,00

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
351	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	25.245.000,00
352	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 KOTA JAMBI	197.760.000,00
353	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 12 MERANGIN	199.104.000,00
354	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 13 KOTA JAMBI	197.740.000,00
355	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 4 TANJABTIM	198.952.000,00
356	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 MERANGIN	264.479.126,00
357	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 18 TEBO	9.834.000,00
358	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 SAROLANGUN, SMAN 8	25.278.000,00
359	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 TANAH SEPENGGAL	6.237.000,00
360	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SLB NEGERI MUARA BUNGO	100.000.000,00
361	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SLB NEGERI TANJABTIM	91.800.000,00
362	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SLB NEGERI MUARA BULIAN	118.839.000,00
363	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		26.829.000,00
364	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 PELEPAT ILIR	11.990.000,00
365	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	680.735.513,00
366	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUARA BUNGO	199.807.000,00
367	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 MUARA BUNGO	79.811.000,00
368	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 7 TEBO	49.840.000,00
369	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 19 TEBO	11.900.000,00
370	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 6 KOTA JAMBI	379.371.346,00
371	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN TITIAN TERAS	8.360.000,00
372	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	139.846.000,00
373	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN TITIAN TERAS	194.200.000,00
374	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 SAROLANGUN	128.393.552,00
375	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 17 MERANGIN	8.500.000,00
376	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 BATANGHARI	8.500.000,00
377	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 SAROLANGUN	8.500.000,00
378	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MUARO JAMBI	8.500.000,00
379	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 9 BATANGHARI	12.060.000,00
380	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN TITIAN TERAS	6.400.000,00
381	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 SAROLANGUN	17.860.000,00
382	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		11.108.760,00
383	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		19.726.400,00
384	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 5 KOTA JAMBI	171.685.173,00
385	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 1 BATANGHARI	199.990.891,00
386	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 15 TEBO	74.500.000,00
387	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		36.500.000,00
388	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 TANJABTIM	199.132.782,00
389	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 2 MUARO JAMBI	12.060.000,00
390	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		42.934.000,00
391	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 6 MUARO JAMBI	199.990.891,00
392	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMAN 7 SAROLANGUN	199.990.891,00
393	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor		4.984.000,00
394	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	3.580.000,00
395	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUKO-MUKO BATHIN VII	198.898.000,00
396	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	8.000.000,00
397	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	7.950.000,00
398	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN SPP JAMBI	9.930.000,00
399	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 8 TEBO	9.980.000,00
400	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	199.780.000,00
401	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 6 KOTA JAMBI	29.783.000,00
402	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 5 KOTA JAMBI	42.589.000,00
403	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 3 KOTA JAMBI	58.173.000,00
404	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 BETARA	9.960.000,00
405	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	11.880.000,00
406	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUARA BUNGO	11.918.000,00
407	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 5 SUNGAI PENUH	79.875.000,00
408	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	25.641.000,00
409	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	290.576.686,00

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
410	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	9.581.000,00
411	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 KOTA JAMBI	79.704.000,00
412	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 MUARA BUNGO	10.000.000,00
413	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 2 MUARA BUNGO	98.729.000,00
414	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	20.000.000,00
415	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	SMKPP JAMBI	175.603.365,00
416	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	SMKN SPP JAMBI	9.940.000,00
417	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	SMKN SPP JAMBI	11.930.000,00
418	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	SMKN 2 KOTA JAMBI	99.877.000,00
419	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	SMKN SPP JAMBI	199.880.000,00
420	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	SMKN 1 KOTA JAMBI	99.960.000,00
421	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	SMKN 1 PELEPAT ILIR	9.735.000,00
422	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		24.816.000,00
423	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	DISDIK JAMBI	22.836.000,00
424	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	SMKN 6 KOTA JAMBI	199.863.000,00
425	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		188.860.000,00
426	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		9.996.000,00
427	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		11.990.000,00
428	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		9.940.000,00
429	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	SMKPP JAMBI	4.732.350.000,00
430	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	SMKPP JAMBI	137.954.000,00
431	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	SMKN 2 MERANGIN	199.400.000,00
432	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	SMKN 2 MERANGIN	8.980.000,00
433	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		116.481.000,00
434	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		90.880.000,00
435	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		133.382.000,00
436	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		4.930.000,00
437	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		4.000.000,00
438	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		4.977.000,00
439	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		5.880.000,00
440	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		7.300.000,00
441	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		8.890.000,00
442	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	57.510.000,00
443	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	43.110.000,00

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
444	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	37.710.000,00
445	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 9 MUARA JAMBI	35.850.000,00
446	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 6 KERINCI	35.910.000,00
447	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 4 SUNGAI PENUH	35.940.000,00
448	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	124.605.000,00
449	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	93.405.000,00
450	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMK PP MERANGIN	35.857.500,00
451	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMK PP MERANGIN	83.667.500,00
452	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 9 MUARA JAMBI	83.650.000,00
453	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	7.185.000,00
454	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	87.990.000,00
455	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	9.585.000,00
456	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 4 SUNGAI PENUH	83.860.000,00
457	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 6 KERINCI	83.790.000,00
458	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	7.463.000,00
459	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 4 SUNGAI PENUH	7.090.000,00
460	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	7.595.000,00
461	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 4 SUNGAI PENUH	7.090.000,00
462	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	5.705.000,00
463	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	11.440.000,00
464	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 6 KERINCI	4.745.000,00
465	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 4 SUNGAI PENUH	4.745.000,00
466	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMK PP MERANGIN	4.750.000,00
467	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 9 MUARA JAMBI	4.770.000,00
468	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 9 MUARA JAMBI	7.170.000,00
469	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 3 KOTA JAMBI	4.975.000,00
470	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMK PP MERANGIN	7.150.000,00
471	Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	SMKN 1 TANAH SEPENGGAL	8.490.000,00
472	Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	SMAN 5 TANJABTIM	111.200.000,00
473	Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan		83.400.000,00

NO	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
474	Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	SMAN 5 TANJABTIM	83.400.000,00
475	Pengadaan Bangunan Asrama	SMAN 10 TANJABTIM	184.915.200,00
476	Pengadaan Bangunan Asrama	SMAN 10 TANJABTIM	138.686.400,00
477	Pengadaan Bangunan Asrama	SMAN 10 TANJABTIM	138.686.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>55.249.312.885,00</b>



#### **Lampiran 5.4**

Rincian Belanja Modal Jaringan, Irigasi dan Jaringan TA 2018

No	Uraian Belanja	Pengguna	Realisasi Belanja
1	Pengadaan Jalan Khusus		2.865.000,00
2	Pengadaan Jalan Khusus	SMKN 6 KOTA JAMBI	64.393.000,00
3	Pengadaan Jalan Khusus		2.475.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>69.733.000,00</b>